



BUPATI SUMEDANG
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMEDANG,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);

4. Undang-Undang...

4. Undang-Undang Nomor 105 Tahun 2024 tentang Kabupaten Sumedang di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7042);
5. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2023 tentang Manajemen Risiko Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 9);
6. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 19);
7. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 13 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2024 Nomor 13);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 10 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 50);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah 2018-2038 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2018 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 1);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 51);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2025 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 60);

MEMUTUSKAN:...

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Daerah Kabupaten Sumedang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sumedang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik adalah Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.
6. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 adalah dokumen perencanaan Pembangunan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dengan berpedoman pada rencana jangka panjang Daerah dan rencana pembangunan jangka menengah nasional terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2029.
7. Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
8. Rencana Kerja Pemerintah Daerah adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
9. Rencana Kerja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
10. Tujuan adalah kinerja yang ingin diwujudkan selama 5 (lima) tahun untuk menggambarkan kebermanfaatan Perangkat Daerah berdasarkan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang diterbitkan oleh Pemerintah Pusat dan/atau memperhatikan sasaran rencana pembangunan jangka menengah Daerah.
11. Sasaran adalah rangkaian kinerja yang dapat berupa tahapan dan fokus/aspek prioritas menuju terwujudnya pencapaian tujuan Renstra Perangkat Daerah.

12. Strategi adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus, dan penentuan program/kegiatan/sub kegiatan dalam menghadapi lingkungan dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra Perangkat Daerah.
13. Arah Kebijakan adalah rangkaian kerja yang merupakan operasonalisasi norma, standar, prosedur, dan kriteria sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah dan arah kebijakan rencana pembangunan jangka menengah Daerah serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah.
14. Permasalahan adalah pernyataan yang disimpulkan dari kesenjangan antara realitas/capaian pembangunan dengan kondisi ideal yang seharusnya tersedia.
15. Isu Strategis adalah kondisi atau hal yang perlu diperhatikan dan dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya dapat mempengaruhi daerah baik secara langsung ataupun tidak langsung secara signifikan di masa datang.
16. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan tugas dan fungsi.
17. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran dalam rangka mencapai hasil suatu Program.
18. Kinerja adalah capaian hasil kerja.
19. Risiko adalah kemungkinan terjadinya suatu peristiwa yang membawa akibat yang tidak diinginkan atas pencapaian tujuan dan sasaran organisasi.
20. Manajemen Risiko adalah serangkaian kegiatan terencana dan terukur untuk mengelola dan mengendalikan risiko yang berpotensi mengancam keberlangsungan dan pencapaian tujuan organisasi.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029.
- (2) Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

BAB III
SISTEMATIKA

Pasal 3

- (1) Sistematika Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:
 - a. BAB I : Pendahuluan;
 - b. BAB II : Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
 - c. BAB III : Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan;
 - d. BAB IV : Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan; dan
 - e. BAB V : Penutup.
- (2) Ketentuan mengenai uraian sistematika Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2025-2029 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV
MANAJEMEN RISIKO

Pasal 4

- (1) Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik wajib menerapkan Manajemen Risiko dalam penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi Rencana Strategis Dinas.
- (2) Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
 - a. menjamin pencapaian tujuan, sasaran, dan indikator kinerja Perangkat Daerah;
 - b. meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelaksanaan program dan kegiatan;
 - c. meminimalkan potensi terjadinya penyimpangan, kegagalan, dan kerugian; dan
 - d. memperkuat akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah.
- (3) Penerapan Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan secara terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan pengendalian intern pemerintah.
- (4) Manajemen Risiko meliputi tahapan:
 - a. penetapan konteks;
 - b. identifikasi risiko;
 - c. analisis risiko;
 - d. evaluasi risiko; dan
 - e. pengendalian risiko.

(5) Hasil...

- (5) Hasil Manajemen Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai dasar dalam:
 - a. penyusunan kebijakan dan strategi Perangkat Daerah;
 - b. perumusan program dan kegiatan;
 - c. penetapan target kinerja; dan
 - d. pengambilan keputusan manajerial.
- (6) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik bertanggung jawab atas penerapan Manajemen Risiko di lingkungan Perangkat Daerah yang dipimpinnya.

BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Rencana Strategis Dinas.
- (2) Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik melaporkan hasil pengendalian dan evaluasi Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan Pembangunan Daerah.
- (3) Pelaksanaan pengendalian, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumedang.

Ditetapkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR

Diundangkan di Sumedang
pada tanggal 18 September 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG,

ttd

TUTI RUSWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMEDANG NOMOR 49 TAHUN 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN SUMEDANG



YAN MAHAL RIZZAL, S.H., M.H.
NIP. 197701042006041002

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI SUMEDANG

NOMOR 46 TAHUN 2025

TENTANG

RENCANA STRATEGIS DINAS KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA, PERSANDIAN DAN STATISTIK
KABUPATEN SUMEDANG TAHUN 2025-2029



RENCANA STRATEGIS

TAHUN 2025-2029



**DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,
PERSANDIAN DAN STATISTIK**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Strategis merupakan suatu proses Penyempurnaan yang berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul. Rencana strategis mengandung tujuan, sasaran, serta cara pencapaian yang realistis untuk mengantisipasi perkembangan masa depan.

Sesuai amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, menyatakan bahwa perencanaan pembangunan daerah disusun secara berjangka meliputi rencana pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah untuk jangka waktu 20 tahun, Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah, Rencana Strategis (Renstra) OPD untuk jangka waktu 5 tahun, Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD).

Disamping itu, sesuai dengan amanat Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pada Pasal 272 ayat (1), menyatakan bahwa “Perangkat Daerah menyusun rencana strategis dengan berpedoman pada RPJMD”, dan ayat (2) menyatakan bahwa “Rencana strategis Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Selain dari itu Perubahan Renstra Perangkat Daerah diakibatkan juga karena adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi.

Kodefikasi, dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang merupakan unsur Pelaksanaan Pemerintahan Daerah Kabupaten Sumedang dalam Bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik yang mempunyai tugas pokok membantu Kepala Daerah dalam melaksanakan urusan Pemerintahan dibidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik sesuai ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku. Adapun Rencana Strategis (Renstra) tersebut akan digunakan sebagai pedoman pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub kegiatan selama Periode Lima tahun dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada sehingga tujuan yang akan dicapai dapat secara realistis mengantisipasi perkembangan masa depan.

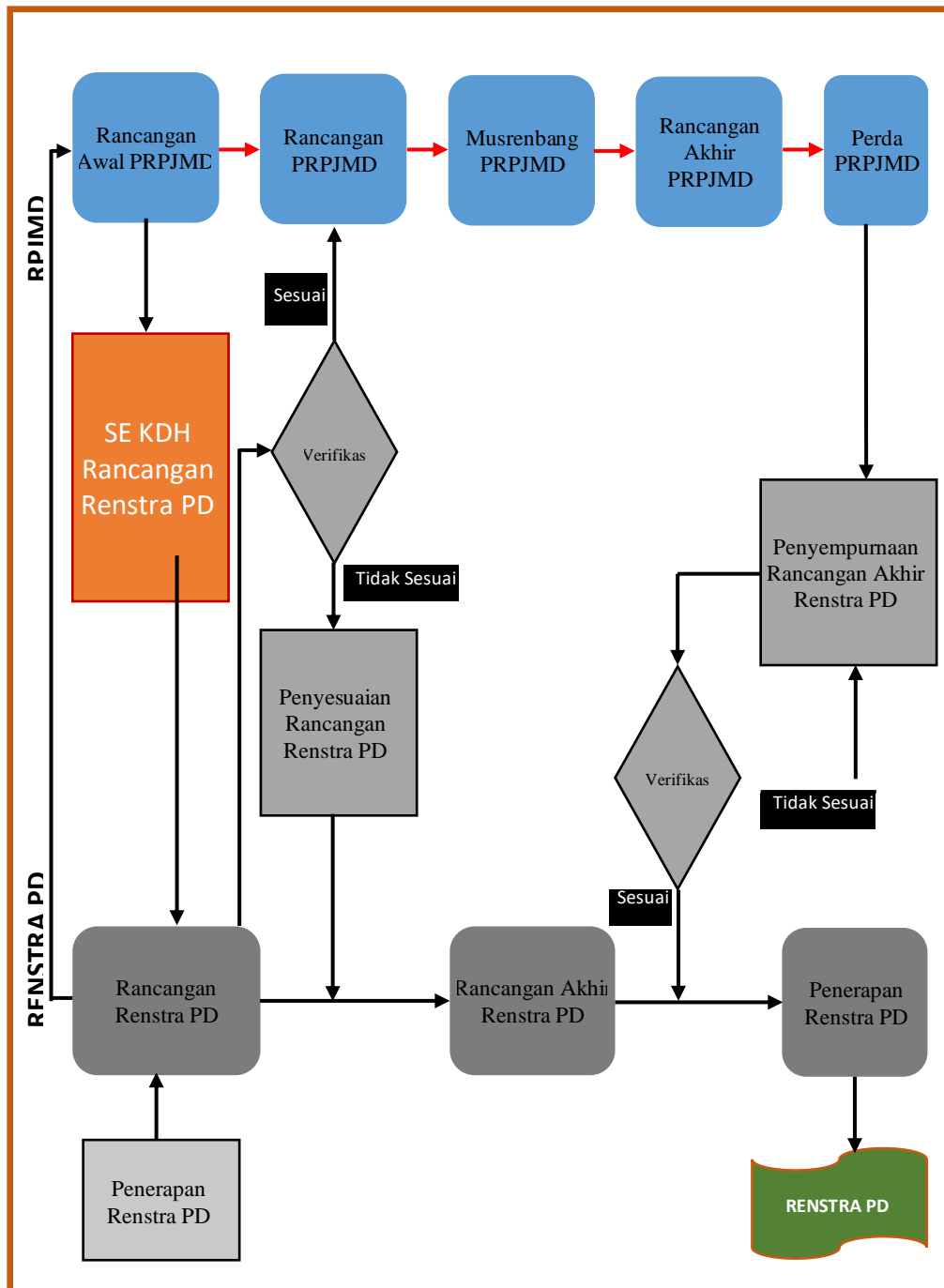
Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dihasilkan melalui proses penyusunan Renstra yang mengacu berdasarkan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negara Nomor 86 Tahun 2017 yang secara rinci dijabarkan dalam Lampiran Peraturan tersebut. Proses penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dilaksanakan dengan beberapa tahap, sebagai berikut :

1. Persiapan penyusunan rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik ;
2. Penyusunan rancangan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik;
3. Penyusunan rancangan akhir Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik ;
4. Penetapan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik. Adapun bagan alur penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan

Statistik yang di mulai dari penyusunan rencana Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sampai dengan penetapan Perubahan Renstra OPD (lihat Gambar 1.1). Selain itu Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang periode Tahun 2025-2029 tidak terlepas dari hubungan dan keterkaitan dengan Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Sumedang (PRPJMD) periode 2025 – 2029 (lihat Gambar 1.2). Untuk selanjutnya Dokumen Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang akan menjadi pedoman penjabaran atas pelaksanaan kegiatan serta anggaran tahunan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam dokumen Renja dan RKA.

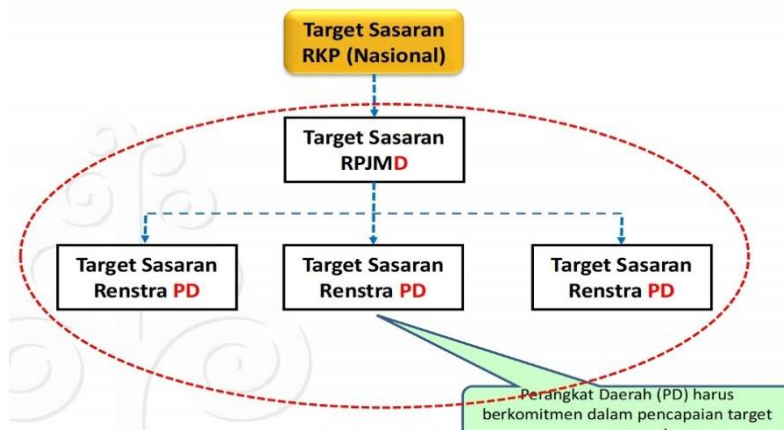
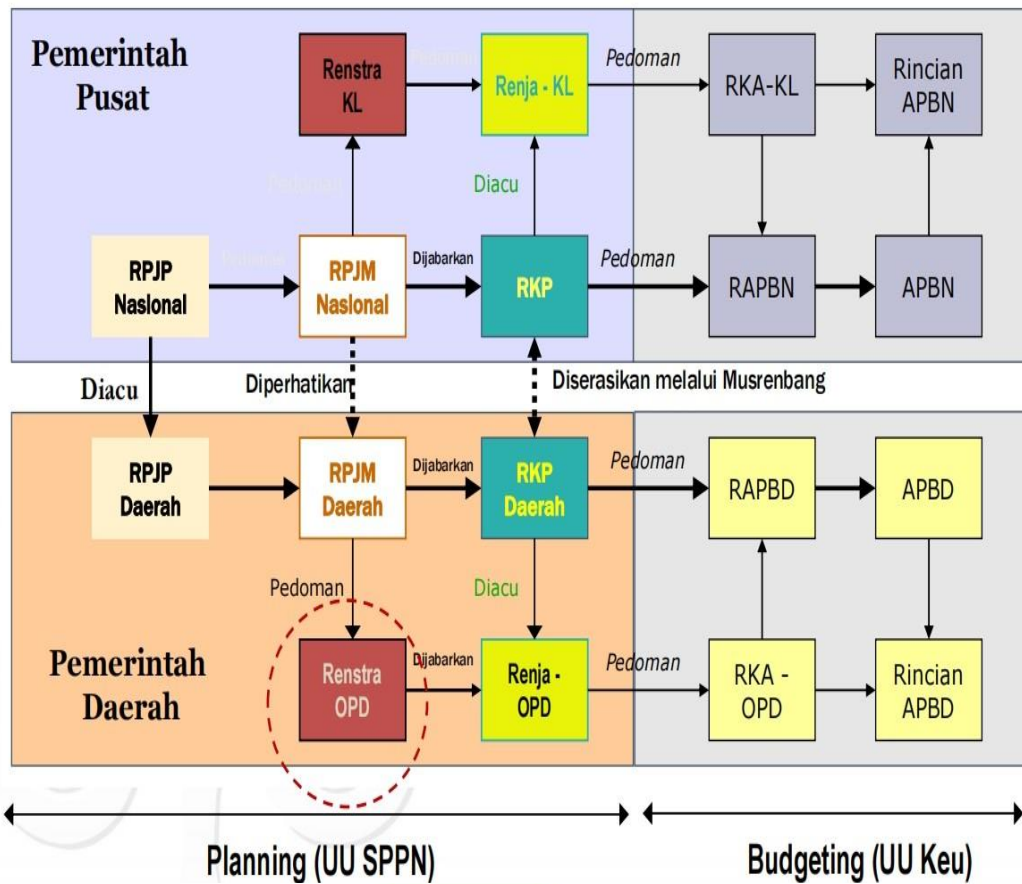
Gambar 1.1

**Bagan Alur Penyusunan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika,
Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Periode 2025-2029**



Gambar 1.2

Keterkaitan Renstra SKPD dengan Dokumen Perencanaan lainnya



Dengan disusunnya Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Periode 2025–2029 maka Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik diharapkan mampu melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam mewujudkan peningkatan kualitas kebijakan dan pelayanan di Bidang komunikasi, informatika, persandian dan statistik secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyelarasan kebijakan pembangunan daerah dengan setiap OPD, sehingga Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dapat turut adil dalam mewujudkan tujuan dan agenda prioritas Pembangunan di Kabupaten Sumedang.

1.2 Landasan Hukum

Peraturan Perundang-undangan yang menjadi landasan hukum bagi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 Nomor 47 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan DaUndang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonsia Nomor 4700);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Republik Indonsia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagai telah di ubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengolahan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran negara Nomor 4815);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4816);
 10. Peraturan Pemerintah No. 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi
-

- Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4817);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
 13. Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
 14. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019;
 15. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia;
 16. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
 17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara
-

Perubahan Rencana Pembangunan jangka Panjang Daerah, Rencana Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomerklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
 19. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
 20. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Sumedang (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2016 Nomor 3);
 21. Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2021 Nomor 153) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Sumedang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sumedang Nomor 153 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 3);
 22. Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2021 tentang Satu Data Sumedang;
 23. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 11 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Sumedang Tahun 2024 Nomor 11);
 24. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 8 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah
-

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

1. Sebagai arah dan Kebijakan untuk mencapai tujuan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan;
2. Sebagai indikator kunci keberhasilan bagi pihak manajemen Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam melaksanakan fungsinya.

1.3.2 Tujuan

1. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja 5 (lima) tahun kedepan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
2. Sebagai Pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang;
3. Sebagai tolok ukur dalam penyusunan Laporan Pertanggung jawaban Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

1.4. Sistematika Penulisan

Bab. I Pendahuluan

Pada bab ini terdapat 4 (empat) sub bab yang berisi tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

- 1.1 Latar Belakang
Gambaran kondisi yang mendasari disusunnya Renstra PD Tahun 2025-2029 dan dilengkapi definisi, amanat regulasi, dan nilai strategis Renstra PD
- 1.2 Landasan Hukum
Dasar hukum yang relevan dan signifikan disusun sesuai dengan kaidah penyusunan produk hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
Menguraikan maksud dan tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan
Menjelaskan sistematika penulisan yang berisi uraian ringkas tentang masing-masing BAB.

Bab. II Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

- a. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah
- b. Sumber Daya Perangkat Daerah
- c. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah (termasuk pencapaian SPM sesuai dengan tupoksi)
- d. Kelompok sasaran layanan (misalnya Bapperida, kelompok sasaran adalah Perangkat Daerah)

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

- a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah
- b. Isu Strategis

Bab. III Tujuan, Sasaran, Strategis dan Arahan Kebijakan

3.1 Tujuan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

3.2 Sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

- a. Indikator Kinerja Utama (IKU) Perangkat Daerah
-

3.3 Strategi Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

- a. Strategi Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah• langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/ subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD
- b. Penahapan pembangunan dimaksud adalah prioritas pembangunan tahunan dalam rangka pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah. Penahapan Renstra PD dapat disajikan seperti pada tabel 3.4

3.4 Strategi Renstra Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029

- a. Arah Kebijakan Renstra PD Tahun 2025-2029 adalah rangkaian kerja yang merupakan operasionalisasi NSPK sesuai dengan tugas dan fungsi PD dan arah kebijakan RPJMD serta selaras dengan strategi dalam rangka mencapai target tujuan dan sasaran Renstra PD.

Bab. IV Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Kinerja Penyelenggaraan Urusan

4.1. Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Program, kegiatan dan subkegiatan merupakan hasil cascading dari tujuan, sasaran, outcome, dan output

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan

- a. Program, kegiatan dan yang mengacu pada nomenklatur yang diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri beserta pemutakhirannya
- b. Daftar program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam mencapai kinerja PD dimulai dari tahun 2025 hingga tahun 2030 sehingga perlu pernyataan eksplisit bahwa program T ahun 2030 merupakan bagian dari upaya menjaga kesinambunga perencanaan PD yaitu pijakan penyusunan Renja PD Tahun 2030

4.3. Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah

4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK)

- a. Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK)
- b. IKK berlaku dari Tahun 2025 hingga tahun 2030

Bab. V Penutup

Memuat diantaranya kesimpulan penting substansial, kaidah pelaksanaan, dan pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan berdasarkan urusan pemerintahan daerah

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU
STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

a. Tugas, Fungsi dan Struktur Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

Sebagaimana Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2016 yang kemudian telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Mempunyai Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi sebagai berikut.

a.1. Tugas

Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik mempunyai tugas melaksanakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten dalam rangka pelaksanaan sebagian tugas Bupati di bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik.

a.2. Fungsi

Dalam menyelenggarakan tugas pokok diatas, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang memiliki fungsi sebagai berikut :

- a. Perumusan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;

- b. Pelaksanaan kebijakan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- d. Pelaksanaan administrasi dinas dibidang komunikasi dan informatika, bidang persandian dan bidang statistik;
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

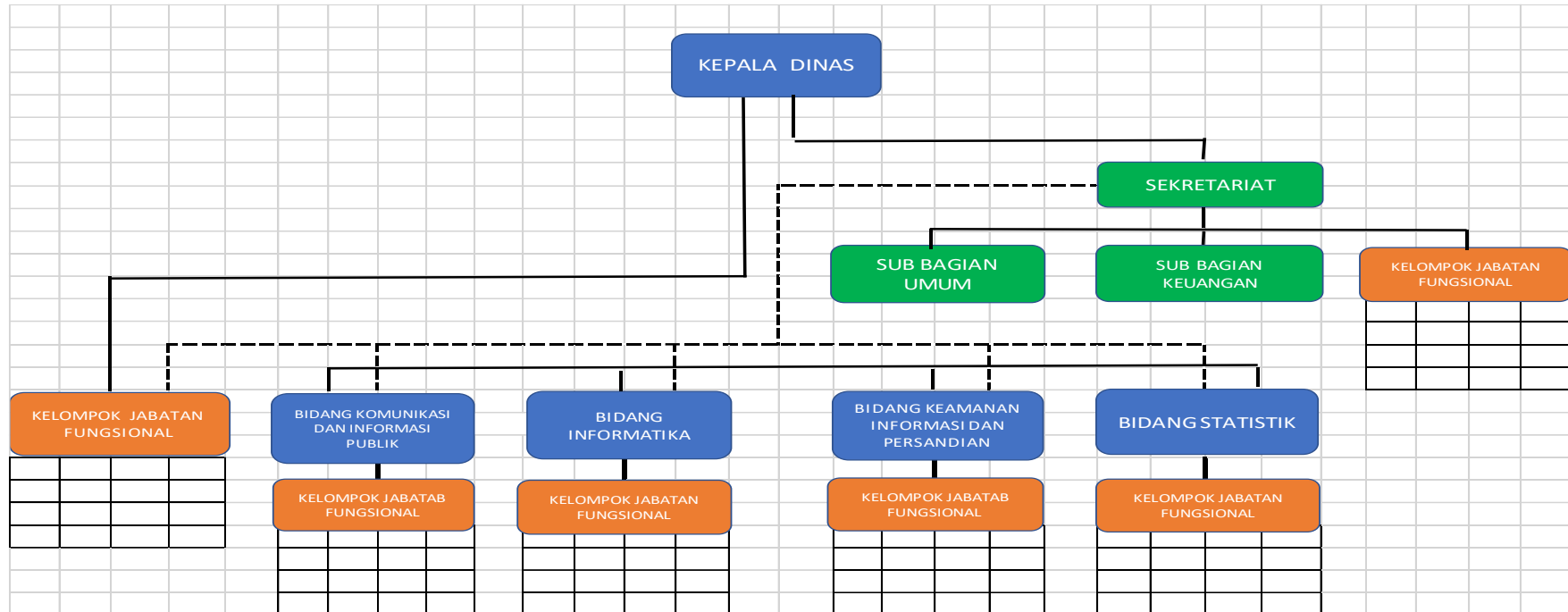
a.3 Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Informasi dan Komunikasi Publik;
- d. Bidang Informatika;
- e. Bidang Keamanan Informasi dan Persandian;
- f. Bidang Statistik;
- g. Jabatan Fungsional.

Penjelasan lebih lanjut mengenai Struktur Organisasi dapat dilihat dalam Peraturan Bupati Nomor 153 Tahun 2021 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Sumedang, untuk Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik sebagaimana Gambar 2.1 dibawah ini :

Gambar 2.1 x



b. Sumber Daya Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

Sampai saat ini atau tahun 2025, jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dan Jajarannya sebanyak 41 Orang pegawai (empat puluh satu) dengan profil demografi sebagai berikut:

b.1. Jumlah Pegawai Menurut Kelompok Umur

Berdasarkan Tabel b.1 jumlah pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang sebanyak 41 orang pegawai paling banyak berada di kelompok usia diantara 41 s/d 45 tahun dan diatas 50 tahun sebanyak 9 orang. Untuk lebih jelasnya lihat tabel 2.1 di bawah ini;

Tabel 2.1 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

No	Unit Kerja	Usia (Tahun)							Jumlah
		20 s/d 25	26 s/d 30	31 s/d 35	36 s/d 40	41 s/d 45	46 s/d 50	>50	
1	Sekretaris		1		1	5	5	3	12
2	Bidang Informasi dan Komunikasi		2		1	1		1	5
3	Bidang Informatika		1	1		2	1		5
4	Bidang Keamanan Informasi dan Persandian	1	2	3			1	2	9

5	Bidang Statistik	1	1	2		1		2	7
TOTAL		2	7	6	2	9	7	9	41

b.2. Jumlah Pegawai Menurut Golongan

Berdasarkan Tabel 2.2 dibawah, pegawai dinas komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik yang paling banyak ada pada golongan III sebanyak 32 Orang sedangkan yang menempati golongan IV sebanyak 4 Orang.

Tabel 2.2 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

No	Unit Kerja	Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	Sekretaris		4	7	2	13
2	Bidang Komunikasi		1	5		6
3	Bidang Informatika			6	1	7
4	Bidang Persandian		1	6		7
5	Bidang Statistik			7	1	8
TOTAL			6	32	4	42

b.3. Jumlah Pegawai Menurut Tingkat Pendidikan

Berdasarkan data tabel b.3. menurut tingkat pendidikannya Sebagian besar pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang adalah mereka yang memiliki tingkat pendidikan sarjana /S-1 sebanyak 26 Orang

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa, secara umum tingkat pendidikan pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang sudah memadai

Dalam Perspektif kedepan perlu dilakukan peningkatan kompetensi melalui peningkatan tingkat pendidikan pegawai ke jenjang S1 dan S2. Secara numerik penjelasan lebih lanjut dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 2.3 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika Persandian dan Statistik Menurut Tingkat Pendidikan

No	Unit Kerja	Tingkat Pendidikan				Jumlah
		SMA	D III	S1	S2	
1	Sekretaris	3	3	4	4	14
2	Bidang Komunikasi	1	1	4		6
3	Bidang Informatika	1		5	1	7
4	Bidang Persandian		1	6		7
5	Bidang Statistik			7	1	8
TOTAL		5	5	26	6	42

b.4 Jumlah Pegawai Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

Pada Tabel 2.4 dapat dilihat, bahwa pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang bila dikelompokkan menurut jenis kelamin dan jabatan, sebagai berikut :

Tabel 2.4 Jumlah Pegawai Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Menurut Jenis Kelamin dan Jabatan

No	Jabatan	Golongan		Jumlah
		L	P	
1	Eselon II	1		1
2	Eselon III	4	1	5
3	Eselon IV	7	1	10
4	Non Eselon	17	11	23
TOTAL		29	13	42

b.5 Sarana dan Prasarana Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

Disamping sumber daya manusia yang diperlukan untuk mendukung tugas-tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang tersebut, juga terdapat sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang. Adapun jenis sarana dan prasarana (aset/modal) yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja,

peralatan komputer, telekomunikasi dan transportasi serta peralatan utama dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang khususnya dalam fungsi teknis. Saat ini, kondisi sarana dan prasarana di Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang belum mencukupi dan memadai dalam menunjang kinerja organisasi. Secara umum khususnya aset tetap berupa peralatan dan mesin masih dalam keadaan baik. Secara lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.5 berikut ini.

Tabel 2.5 Jumlah Aset/Modal Menurut Jenis pada Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik s/d TA. 2025

No	Jenis Aset/Modal	Jumlah Barang	Kondisi		Keterangan
			Baik	Rusak Berat	
1	Kendaraan roda 4	8 Unit	7	1	
2	Kendaraan roda 2	17 Unit	15	-	1 hilang (TGR), 1 unit dibawa purnatugas
3	Peralatan kantor :				
	Komputer	21	15	6	
	Laptop	42	39	3	
	Meja 1 biro	7	7		
	Meja ½ biro	7	7		
	Kursi kerja	57	57		
	Kursi tamu	7	7		
	Lemari Arsip	6	6		

c. Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

Kinerja adalah tingkat pencapaian hasil atas pelaksanaan tugas tertentu. Kinerja Organisasi Perangkat Daerah adalah tingkat pencapaian hasil dalam rangka mewujudkan tujuan dari Organisasi Perangkat Daerah. Namun dalam hal melaksanakan kinerja tidak terlepas dari cara untuk mengatur, bagaimana manajemen itu sendiri berjalan. Dimana Manajemen kinerja mengandung arti keseluruhan program dan kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja organisasi perangkat daerah, termasuk kinerja masing-masing individu dan kelompok kerja di organisasi perangkat daerah tersebut.

Terkait dengan hal diatas maka peran, tugas dan fungsi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan statistik kabupaten Sumedang dalam menyelenggarakan urusan dibidang komunikasi dan informatika, persandiaan dan statistik sangatlah penting di dalam mengatasi permasalahan dan menjawab tuntutan perubahan dinamika masyarakat. Maka Pemerintah Kabupaten Sumedang telah merumuskan dan menetapkan kebijakan penyelenggaraan E-Government yaitu dengan menetapkan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Indek Pemerintahan Digital (pemdi).

Tabel 2.6 Realisasi Kinerja Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

Tahun 2020 s/d Tahun 2024

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2020			Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024		
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Capaian Kinerja
Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik	Cakupan Layanan Komunikasi dan Informatika	Persen	100	106,41	106,41												
	Persentase Masyarakat dalam Memahami Program Prioritas Pemerintah Daerah	Persen				42,50	71,11	167,32	50,00	74,29	148,58	60,00	90,80	151,33	70,00	97,44	139,20
Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Berbasis Elektronik	Nilai SPBE	Poin	3,30	3,81	115,45	4,00	3,52	88,00	4,10	3,84	93,66	4,20	4,14	98,57			
	Indeks Layanan SPBE	Poin													3,80	4,69	123,42
Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Ketersediaan data sesuai dengan standar	Persen	85,00	85,00	100	95	98,33	103,51	100	100	100	100	100	100			
	Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Nilai													3,00	3,24	108
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Skor Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Score	300	318	106	350	395	112,86	350	395	112,86	400	535	133,75	450	549	122

Penjelasan dari Tabel 2.6 diatas adalah sebagai berikut :

1. Indikator Persentase Masyarakat dalam Memahami Program Prioritas Pemerintah Daerah ini mengukur seberapa besar pemahaman masyarakat terhadap program-program prioritas yang telah ditetapkan oleh pemerintah daerah dalam kurun waktu tertentu. masyarakat memiliki pemahaman yang baik terhadap program prioritas tersebut.

Faktor Pendorong Keberhasilan

Beberapa faktor yang kemungkinan besar berkontribusi terhadap pencapaian yang melebihi target ini antara lain:

- a. Strategi Komunikasi Publik yang Efektif Pemerintah daerah kemungkinan telah menjalankan strategi komunikasi dan sosialisasi yang efektif, seperti melalui media massa, media sosial, forum warga, dan kegiatan tatap muka langsung.
 - b. Keterlibatan Masyarakat Partisipasi aktif masyarakat dalam forum musyawarah, sosialisasi program, atau kegiatan pembangunan daerah mendorong pemahaman yang lebih baik terhadap program prioritas.
 - c. Transparansi dan Akses Informasi Ketersediaan informasi yang transparan dan mudah diakses oleh publik, baik melalui website resmi, aplikasi layanan publik, atau papan informasi di lingkungan masyarakat, turut meningkatkan pemahaman.
 - d. Kualitas Program yang Relevan Program-program prioritas yang dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat dapat mendorong pemahaman dan penerimaan yang lebih baik.
2. Indikator Nilai SPBE merupakan hasil evaluasi atas penerapan tata kelola pemerintahan yang berbasis

elektronik di lingkungan pemerintah daerah. Penilaian ini mencakup aspek kebijakan, tata kelola, manajemen layanan, dan penerapan teknologi informasi untuk mendukung kinerja birokrasi yang efektif, efisien, dan transparan. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi SPBE di pemerintah daerah kabupaten Sumedang sudah berada pada tingkat yang baik dan stabil, bahkan melebihi ekspektasi yang telah ditetapkan.

3. Indikator ini mengukur seberapa besar persentase data yang tersedia di lingkungan pemerintah daerah yang telah memenuhi standar kualitas data. Standar ini biasanya mencakup aspek: a. Relevansi: Data sesuai dengan kebutuhan pengguna; b. Akurasi: Data benar dan bebas dari kesalahan; c. Kelengkapan: Data tersedia secara menyeluruh; d. Kelengkapan: Data tersedia secara menyeluruh; e. Ketepatan Waktu: Data tersedia sesuai jadwal yang ditentukan
4. Indikator Indeks KAMI (Keamanan Informasi) adalah alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat kesiapan dan kematangan penerapan keamanan informasi di instansi pemerintah. Indeks ini dikeluarkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), dan mencakup lima domain utama: a. Tata Kelola Keamanan Informasi; b. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi; c. Kerangka Kerja Keamanan Informasi; d. Pengelolaan Teknologi dan Keamanan Informasi; e. Manajemen Aset Informasi

d. Kelompok Sasaran Layanan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

Kelompok sasaran layanan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik (DiskominfoSanditik)

meliputi seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah yang membutuhkan dukungan informasi, komunikasi, teknologi, keamanan informasi, serta data statistik yang andal. Secara garis besar, kelompok sasaran tersebut terdiri dari:

1. Masyarakat Umum

Sebagai penerima manfaat utama layanan informasi publik, komunikasi publik, literasi digital, serta akses terhadap layanan berbasis teknologi digital.

2. Perangkat Daerah/Organisasi Perangkat Daerah

Sebagai pengguna layanan data statistik sektoral, layanan teknologi informasi dan komunikasi (TIK), keamanan informasi, serta dukungan sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE)./Indek Pemerintahan Digital (pemdi)

3. Pemerintah Daerah dan Pusat

Sebagai mitra koordinasi dalam pengelolaan informasi, persandian, keterbukaan informasi publik, serta implementasi kebijakan nasional seperti Satu Data Indonesia dan transformasi digital

4. Pelaku Usaha, Akademisi dan Komunitas

Sebagai pengguna layanan data, informasi, serta teknologi dalam mendukung inovasi, riset, pengembangan usaha, dan peningkatan daya saing daerah

5. Media Massa dan Lembaga Masyarakat

Sebagai mitra strategis dalam penyebarluasan informasi publik, penguatan literasi media, serta peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah

Dengan penetapan kelompok sasaran layanan tersebut, DiskominfoSanditik diharapkan mampu memberikan layanan yang inklusif, transparan, serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis data dan teknologi digital.

2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

a. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Perumusan isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang sebagai OPD, dilakukan berdasarkan tugas dan fungsi sesuai dengan pelayanan yang diberikan menurut peraturan perundang-undangan. Dalam perumusan isu-isu tersebut akan dimulai dari tahapan identifikasi permasalahan pelayanan tupoksi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, selanjutnya dilakukan telaahan terhadap visi, misi, dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih dalam RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2025-2029 sebagai dasar pelaksanaan tugas Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang kedepan, serta telaahan terhadap instansi vertikal dalam hal ini Kementrian Komdigi RI, BSN dan BPS yang memiliki tugas dan kewenangan yang sama sesuai sasaran strategisnya, yang selanjutnya akan menjadi dasar penetapan isu-isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang periode 2025-2029. Adapun penjelasan tahapan perumusan isu-isu strategis berdasarkan tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

Adapun permasalahan-permasalahan yang dijumpai Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang adalah sebagai berikut :

Tabel 2.7 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas Pokok Dan Fungsi

No	Aspek	Permasalahan
1	Informasi dan Komunikasi Publik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terbatasnya kualitas dan kecepatan penyampaian informasi pembangunan kepada masyarakat 2. Tingkat literasi digital dan literasi informasi masyarakat yang belum merata 3. Rendahnya partisipasi publik dalam pemanfaatan kanal informasi resmi pemerintah daerah 4. Tantangan hoaks, disinformasi, dan berita palsu yang mengganggu kualitas komunikasi publik
2	Informatika	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemanfaatan aplikasi layanan publik masih belum terstandar 2. Tingkat adopsi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) belum optimal 3. Infrastruktur TIK pemerintah daerah belum merata dan belum sepenuhnya terintegrasi 4. Keterbatasan SDM pengelola TIK di perangkat daerah
3	Keamanan Informasi dan Persandian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Masih kurangnya Pemahaman pemerintah daerah dalam mengelola resiko keamanan data 2. Belum terjaminnya Keamanan data secara umum 3. Keterbatasan infrastruktur persandian dan sistem proteksi terhadap ancaman siber

		4. Kesiapsiagaan penanganan insiden keamanan informasi masih terbatas.
4	Statistik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum sepenuhnya terwujud keterpaduan data sektoral sesuai prinsip Satu Data Indonesia 2. Kualitas data statistik sektoral masih beragam dan belum standar 3. Pemanfaatan data statistik dalam perencanaan dan evaluasi pembangunan belum optimal. 4. Koordinasi dan kolaborasi antar-OPD dalam penyediaan serta pemanfaatan data belum maksimal

b. Isu Strategis

Dalam rangka mewujudkan pelayanan publik yang efektif, inklusif, dan berkelanjutan, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandiaan dan Statistik menghadapi sejumlah isu strategis yang perlu dijadikan fokus utama dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan lima tahun ke depan. Isu strategis ini disusun dengan mempertimbangkan hasil analisis terhadap kondisi pelayanan saat ini, potensi daerah, permasalahan internal perangkat daerah, isu pembangunan berkelanjutan (KLHS), serta dinamika lingkungan strategis baik global, nasional, maupun regional.

Selain isu strategis terkait pelayanan publik, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandiaan dan Statistik juga dihadapkan pada isu strategis daerah lainnya. Karena pada prinsipnya isu strategis daerah Kabupaten Sumedang dirumuskan dari permasalahan-permasalahan yang terdapat di seluruh wilayah administratif kabuapen Sumedang. Disamping itu perangkat daerah memiliki kewenangan koordinatif untuk dapat menyusun kebijakan di SKPD masing-masing. Oleh karena itu dalam Renstra ini, isu strategis Kabupaten Sumedang juga dimuat untuk merumuskan Isu Strategi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandiaan dan statistik. Isu strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandiaan dan statistik menggunakan teknik perumusan yang disajikan pada tabel berikut

Tabel 2.8 Isu Strategis Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

POTENSI DAERAH YANG MENJADI KEWENANGAN	PERMASALAHAN PD	ISU KLHS YANG RELEVAN DENGAN PD	ISU LINGKUNGAN DINAMIS YANG RELEVAN DENGAN PD			ISU STRATEGIS PD
			GLOBAL	NASIONAL	REGIONAL	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Menguatkan Birokrasi Profesional dan Responsif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Literasi Digital Masyarakat 2. Optimalisasi kanal komunikasi pemerintah 3. Kolaborasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat (KIM) 4. Profesional SDM Komunikasi Publik 5. Integrasi Sistem Informasi Publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penguatan Inovasi, Digitalisasi dan kemudahan akses layanan publik 2. Pemerataan konektivitas jaringan internet 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola Pemerintahan 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tata Kelola Pemerintahan dan Profesionalitas Aparatur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) 2. Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba 3. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap penggunaan media digital yang aman dan produktif 2. Belum semua perangkat daerah dan profesional dalam mengelola kanal komunikasi publik (website, medsos, aplikasi layanan) 3. Peran KIM belum optimal sebagai mitra pemerintah dalam diseminasi informasi publik 4. Keterbatasan jumlah dan kapasitas ASN bidang komunikasi publik, baik dinas teknis maupun perangkat daerah 5. Masih terpisahnya data

Berdasarkan hasil identifikasi potensi daerah yang menjadi kewenangan Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandiaan dan statistik, diketahui bahwa ketersediaan sumber daya manusia (SDM) serta sarana dan prasarana pelayanan publik merupakan faktor penunjang utama dalam penyelenggaraan pemerintahan yang efektif dan responsif. Namun demikian, masih terdapat sejumlah permasalahan mendasar, antara lain kompetensi SDM yang belum optimal, keterbatasan sarana dan prasarana pelayanan publik yang belum sepenuhnya inklusif, serta ketimpangan aksesibilitas layanan di wilayah Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandiaan dan statistik. Selain itu, reformasi birokrasi yang belum berjalan optimal juga menjadi tantangan tersendiri dalam upaya meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan.

Sejalan dengan hal tersebut, isu KLHS RPJMD Kabupaten Sumedang yang relevan menunjukkan perlunya peningkatan kualitas regulasi, koordinasi perencanaan, serta pengelolaan wilayah yang mendukung pelestarian lingkungan dan keberlanjutan pembangunan.

Isu strategis ini akan menjadi fondasi utama dalam merumuskan tujuan, sasaran, arah kebijakan, serta program dan kegiatan prioritas Kecamatan Tomo pada periode perencanaan mendatang. Penanganan isu ini secara konsisten akan menjadi kunci dalam mewujudkan pelayanan publik yang responsif, inklusif, dan berdaya saing.

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

3.1. Tujuan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan yang didalamnya berisi suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan, cita dan citra yang ingin diwujudkan, dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen *stakeholders*.

Sesuai dengan arahan RPJMD Kabupaten Sumedang periode 2025-2029 bahwa pemerintah Kabupaten Sumedang akan mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan. Adapun visi pemerintah Kabupaten Sumedang sesuai dengan RPJMD periode 2025-2029 sebagai berikut.

“Sumedang SIMPATI Semakin Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045” Sejahtera Masyarakatnya, Agamis Akhlaqnya, Maju Daerahnya, Profesional Aparaturnya dan Kreatif Ekonominya. Lebih lanjut penjabaran visi diatas adalah sebagai berikut :

Sejahtera : Kondisi masyarakat Kabupaten Sumedang yang secara lahir dan bathin mendapatkan rasa aman, nyaman dan tentram dalam menjalani kehidupan, yang ditandai dengan meningkatnya pelayanan dasar mencakup sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, infrastruktur dasar, dan sarana ekonomi yang inklusif bagi masyarakat, dan meningkatnya perlindungan, produktifitas dan pemenuhan hak dasar bagi masyarakat.

Agamis : Sikap dan prilaku hidup masyarakat Kabupaten Sumedang yang mencerminkan dan merefleksikan nilai-nilai

agama yang diyakininya. Ditandai dengan banyaknya kegiatan keagamaan, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, dan tidak adanya konflik antar penganut agama (internal dan eksternal). Berfungsinya Lembaga sosial keagamaan dan lembaga pendidikan keagamaan sebagai agen perubahan sosial dalam masyarakat dan mengurangi dampak negatif ekstrimisme, berkembang dan meningkatkan kapasitas serta kualitas lembaga sosial keagamaan, serta aktualisasi nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Maju : Kemampuan masyarakat Kabupaten Sumedang dalam mendayagunakan pikiran dan sumber daya yang ada disekelilingnya, ditandai dengan meningkatnya Pendapatan Asli Daerah (Kapasitas Fiskal), meningkatnya kerja sama antara pemerintah, swasta dan akademisi, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan meningkatnya indeks adaptasi teknologi, tertatanya kawasan serta terbukanya kebijakan shareholding pemerintah dan investor dalam pengelolaan sumber daya alam sehingga dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan keistimewaan suatu daerah.

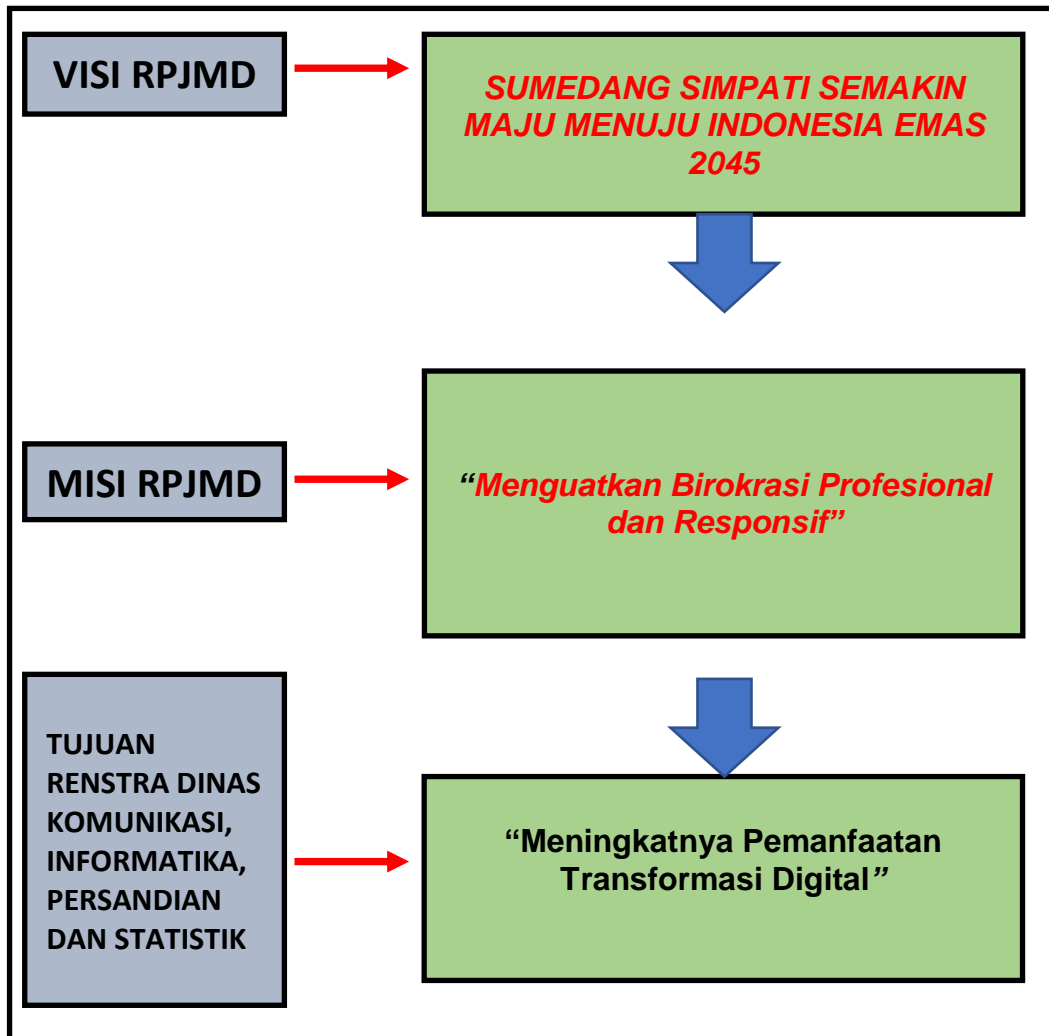
Profesional : Good governance dapat didefinisikan sebagai penyelenggaraan pemerintahan secara partisipatif, efektif, jujur, adil, transparan dan bertanggungjawab kepada semua level pemerintahan. Upaya untuk mewujudkan good governance memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, keterampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam

memberikan pelayanan publik yang responsif, transparansi, efektivitas dan efisien. Ditandai dengan meningkatnya kapasitas aparatur pemerintah dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring pembangunan, pengelolaan keuangan serta pelayanan publik melalui fasilitasi, pelatihan dan pendampingan.

Kreatif : Masyarakat yang memiliki dorongan bekerja untuk menghasilkan sesuatu yang lebih baik secara berkesinambungan, mampu bersaing serta mampu bertahan dalam segala kondisi. Dengan membangun pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, maka proses pembangunan akan menyebar ke wilayah sekitar. Kutub-kutub pertumbuhan itu akan berimbas (trickle down effect) pada wilayah atau daerah sekitarnya secara otomatis. Namun demikian trickle down effect itu hanya akan terjadi dan berlangsung optimal manakala sektor-sektor yang dikembangkan dirancang sedemikian rupa sesuai dengan potensi ekonomi dan sosial di wilayah bersangkutan. Oleh karena itu, perlu disertai dengan kesiapan tenaga-tenaga terampil dalam meningkatkan daya saing daerah. Pada aspek lainnya tumbuh dan berkembangnya sektor kewirausahaan sebagai mainstream dinamika perekonomian masyarakat Kabupaten Sumedang.

Untuk merealisasikan Misi RPJMD Kabupaten Sumedang Tahun 2025 – 2029 Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang, menetapkan tujuan yang akan dicapai dalam jangka waktu 5 (Lima) tahun kedepan. Tujuan dari Dinas Komunikasi, Informatika Persediaan dan Statistik adalah : ***“Meningkatnya Pemanfaatan Transformasi digital”***.

Adapun keterkaitan tujuan Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik dengan Visi Misi RPJMD diilustrasikan dalam skema di bawah ini. :



Tabel 3.1 Teknik merumuskan Tujuan dan Sasaran Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik											
- Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah - Meningkatnya Pemanfaatan Transformasi Digital	Meningkatnya Pemanfaatan Transformasi Digital; Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah		Nilai SPBE (Poin)	4,51	4,3	-	-	-	-	-	
			Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) (Indeks)	-	-	2	2,2	2,4	2,6	2,8	
			Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)	3,64	3,647	3,648	3,649	3,65	3,651	3,652	
		Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah	Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)	93,85	93,85	94,85	95,35	95,85	96,35	96,85	
		Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Indeks)	90	90	91	92	93	94	95	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital	Nilai Kematangan Teknologi Digital (Poin)	-	-	2	2,2	2,4	2,6	2,8	
		Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia (%)	-	-	60	70	80	90	100	
		Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Score Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) (Skor)	450	675	700	725	750	775	800	

3.3. Strategi Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Strategi renstra adalah rencana tindakan yang komprehensif berisikan langkah• langkah/upaya yang akan dilakukan diantaranya berupa optimalisasi sumber daya, tahapan, fokus dan penentuan program/kegiatan/subkegiatan dalam menghadapi lingkungan yang dinamis untuk mencapai tujuan/sasaran Renstra PD

Dengan tujuan yang telah ditetapkan, maka Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang menetapkan strategi diantaranya:

1. Meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui optimalisasi PPID utama dan PPID pelaksana.
2. Memperkuat literasi digital masyarakat
3. Memperluas jangkauan komunikasi publik dengan memanfaatkan multi kanal (media social, website, aplikasi, radio/tv daerah)
4. Mengembangkan branding daerah melalui publikasi inovasi dan capaian pembangunan pemerintah daerah.
5. Memperluas infrastruktur TIK (internet desa, jaringan intra pemerintah, pusat data, command center).
6. Integrasi layanan digital pemerintah.
7. Transformasi digital pemerintah sesuai dengan arsitektur SPBE dan indeks Pemerintahan Digital.
8. Memanfaatkan teknologi berbasis data besar, AI dan IoT untuk pelayanan publik.
9. Mengembangkan sistem keamanan informasi pemerintah daerah (implementasi ISO 27001 atau standar keamanan).

10. Meningkatkan kapasitas SDM siber melalui pelatihan dan sertifikasi keamanan informasi.
11. Optimalisasi pengelolaan sandi untuk mendukung kerahasiaan dan keabsahan informasi pemerintah.
12. Meningkatkan nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI)
13. Mengembangkan sistem satu data
14. Meningkatkan kualitas metadata dan interoperabilitas data antar perangkat daerah.
15. Optimalisasi pemanfaatan data statistic sektoral dalam pengambilan keputusan.
16. Meningkatkan koordinasi dengan BPS dan Perangkat Daerah penghasil data (produsen data) agar data valid, konsisten dan mutakhir.

Penjelasan dan keterkaitan antara sasaran, indikator sasaran dan strategi dijelaskan oleh tabel dibawah ini :

Tabel 3.2 Keterkaitan antara sasaran, indikator sasaran dan strategi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	STRATEGI
Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Meningkatkan keterbukaan informasi publik melalui optimalisasi PPID utama dan PPID pelaksana
		Memperkuat literasi digital masyarakat
		Memperluas jangkauan komunikasi publik dengan memanfaatkan multi kanal (media social, website, aplikasi, radio/tv daerah)
		Memperluas infrastruktur TIK (internet desa, jaringan intra pemerintah, pusat data, command center).
		Mengembangkan branding daerah melalui publikasi inovasi dan capaian pembangunan pemerintah daerah

Meningkatnya Kualitas Layanan Publik melalui Pemanfaatan Tranformasi Digital	Nilai kematangan teknologi digital	Memperluas infrastruktur TIK (internet desa, jaringan intra pemerintah, pusat data, command center)
		Integrasi layanan digital pemerintah
		Transformasi digital pemerintah sesuai dengan arsitektur SPBE dan indeks Pemerintahan Digital
		Memanfaatkan teknologi berbasis data besar, AI dan IoT untuk pelayanan publik
Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan	Persentase ketersediaan data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data indonesia	Mengembangkan sistem keamanan informasi pemerintah daerah (implementasi ISO 27001 atau standar keamanan)
		Meningkatkan kapasitas SDM siber melalui pelatihan dan sertifikasi keamanan informasi
		Optimalisasi pengelolaan sandi untuk mendukung kerahasiaan dan keabsahan informasi pemerintah
		Meningkatkan nilai indeks Keamanan Informasi (KAMI)
Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Score Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Mengembangkan sistem satu data
		Meningkatkan kualitas metadata dan interoperabilitas data antar perangkat daerah
		Optimalisasi pemanfaatan data statistic sektoral dalam pengambilan keputusan
		Meningkatkan koordinasi dengan BPS dan Perangkat Daerah penghasil data (produsen data) agar data valid, konsisten dan mutakhir

Dalam penyusunan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik tahun 2025-2029 terdapat penahapan pembangunan yang dijabarkan per tahap 5 tahun atau per tahun sebagai langkah bertahap menuju tujuan strategis, hal ini dapat dilihat pada Tabel penahapan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik dibawah ini :

Tabel 3.3 Penahapan Renstra Dinas Komunkasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang 2025-2029

TAHAP I (2026)	TAHAP II (2027)	TAHAP III (2028)	TAHAP IV (2029)	TAHAP V (2030)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Meningkatkan	Mengoptimalkan	Mengefektifkan	Pemantapan	Perwujudan
<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan kelembagan , regulasi dan tata Kelola urusan komunikasi informatika, persandian dan statistic • Penguatan regulasi turunan : SOP, pedoman SPBE, Keamanan Informasi serta tata Kelola satu data • Pemetaan kebutuhan infrastruktur TIK, SDM dan aplikasi • Peningkatan layanan komunikasi dan informasi publik berbasis multi kanal 	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan dan perluasan infrastruktur TIK • Penguatan PPID Utama dan PPID pelaksana, peningkatan kualitas layanan informasi publik • Penguatan aplikasi dan sistem keamanan informasi dasar • Pengembangan portal satu data sektoral untuk mendukung satu data Sumedang • Peningkatan literasi digital masyarakat melalui program komunikasi publik 	<ul style="list-style-type: none"> • Integrasi berbagai aplikasi layanan publik • Implementasi sistem keamanan informasi yang lebih matang (Pengendalian akses, audit sistem, sertifikasi SDM) • Integrasi data sektoral antar perangkat daerah dengan BPS melalui portal satu data • Optimalisasi Command Center untuk monitoring program pembangunan • Peningkatan skor indeks 	<ul style="list-style-type: none"> • Pemantapan pemerintahan digital (Pemdi) • Penerapan teknologi inovatif (AI, IoT) • Pemantapan sistem keamanan informasi setara dengan standar nasional /internasional • Peningkatan kualitas publik statistic sektoral dan disemipembangunan • Optimalisasi branding daerah melalui komunik 	<ul style="list-style-type: none"> • Terwujudnya tata Kelola pemerintahan berbasis digital yang efektif, aman dan transparan • Terwujudnya infrastruktur TIK dengan pusat data daerah yang handal dan terintegrasi dengan pusat • Terwujudnya masyarakat digital yang cerdas, kritis dan produktifdalam pemanfaatan teknologi informasi • Terwujudnya satu data daerah yang mendukung perencanaan berbasis data • Indeks Pemdi, Indeks KAMI, Indeks Keterbukaan informasi mencapai target nasional

		KAMI, Indeks Pemi dan Indeks keterbuka an informasi	asi publik kreatif dan partisipa tif	
--	--	---	---	--

3.4. Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Dalam Mencapai Tujuan dan Sasaran Renstra Tahun 2025-2029

Arah Kebijakan yang diterapkan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang pada renstra 2025-2029 adalah:

1. Sasaran ; Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik

Arah kebijakan :

- 1.1. Penguatan peran PPID Utama dan PPID Pelaksana dalam pelayanan keterbukaan informasi publik;
- 1.2. Optimalisasi pemanfaatan kanal komunikasi publik (website, media sosial, radio/TV daerah, aplikasi);
- 1.3. Peningkatan kualitas konten komunikasi publik yang edukatif, transparandan membangun cita positif pemerintah daerah;
- 1.4. Pemberdayaan masyarakat melalui literasi digital dan edukasi anti hoaks.

2. Sasaran ; Meningkatnya Kualitas Layanan Publik melalui Pemanfaatan Tranformasi Digital.

Arah kebijakan :

- 2.1. Pengembangan infrastruktur TIK yang merata, handal dan berkelanjutan;

- 2.2. Integrasi aplikasi layanan publik menjadi satu portal layanan digital daerah;
 - 2.3. Peningkatan capaian indeks Pemerintahan Digital;
 - 2.4. Pengembangan pusat data daerah, command center dan interoperabilitas antar-sistem;
 - 2.5. Peningkatan kualitas SDM digital aparatur daerah.
3. Sasaran : Meningkatkan Kualitas Data Pembangunan.
- Arah kebijakan :
- 3.1. Penguatan sistem satu data yang terintegrasi dengan satu data indonesia;
 - 3.2. Standarisasi metadata dan interoperabilitas data sektoral antar perangkat daerah;
 - 3.3. Peningkatan kualitas dan akurasi data statistik sektoral melalui koordinasi dengan perangkat daerah penghasil data dan BPS;
 - 3.4. Peningkatan diseminasi dan pemanfaatan data sektoral;
 - 3.5. Pembangunan *dashboard* pembangunan berbasis data *real-time*
4. Sasaran : Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah.
- Arah kebijakan :
- 4.1. Penguatan sistem persandian dan tata Kelola keamanan informasi;
 - 4.2. Peningkatan kapasitas dan kesadaran keamanan siber di lingkungan pemerintah daerah;
 - 4.3. Implementasi standar keamanan informasi (Indeks KAMI, ISO 27001);
 - 4.4. Pemanfaatan teknologi enkripsi, tanda tangan digital dan mekanisme proteksi data;
 - 4.5. Peningkatan Kerjasama dengan BSSN dan Lembaga Keamanan Siber Nasional.

Penjelasan keterkaitan antara arah kebijakan RPJMD dan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dijelaskan dengan Tabel dibawah ini :

Tabel 3.4 Teknik Merumuskan Arah Kebijakan Renstra Dinas Komunkasi dan Informatika,Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang 2025-2029

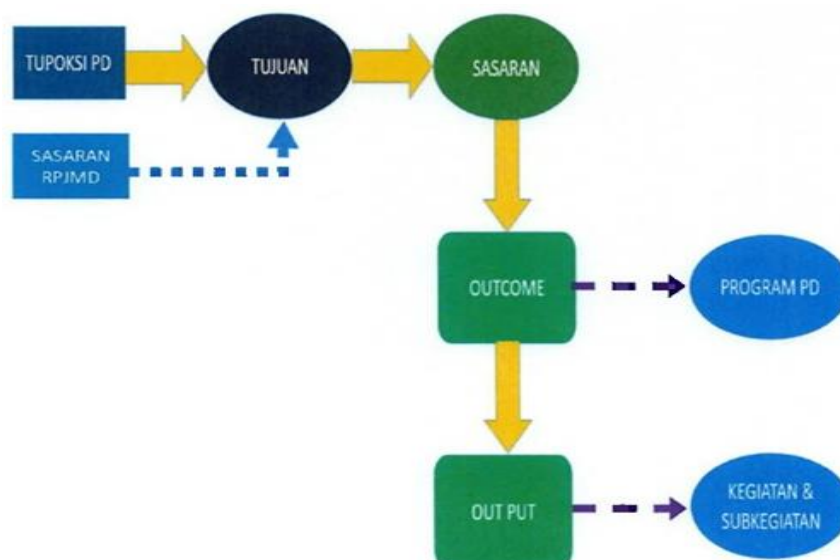
NO	OPERSIONAL NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIAJAKN RENSTRA	KET
(1)	(2)	(3)	(4)	(5) ¹
1	Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik	Terwujudnya layanan informasi publik yang cepat, transparan dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan peran PPID utama dan PPID pelaksana • Pengembangan kanal komunikasi publik digital (website, media sosial, TV/radio daerah) • Literasi digital dan peningkatan prtisipasi masyarakat² 	
2	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik melalui Pemanfaatan Tranformasi Digital	Meningkatnya indeks pemerintahan digital dan integrasi layanan digital	<ul style="list-style-type: none"> • Pengembangan infrastruktur TIK dan jaringan intra pemerintah daerah • Integrasi aplikasi layanan publik • Pemanfaatan pusat data dan command center • Penguatan SDM digital aparatur 	
3	Meningkatnya kualitas data pembangunan	Tersedianya data sektoral yang valid, mutakhir dan terintegrasi	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan sistem satu data daerah terintegrasi dengan satu data Indonesia • Standarisasi metadata dan interoperabilitas data antar perangkat daerah 	

			<ul style="list-style-type: none"> • Diseminasi data pembangunan melalui portal statistik sektoral • Pengembangan dashboard pembangunan berbasis data 	
4	Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah	Terjaminnya keamanan informasi pemerintah daerah	<ul style="list-style-type: none"> • Penguatan tata Kelola keamanan informasi (indeks KAMI, standar ISO 27001) • Peningkatan kapasitas SDM keamanan siber • Implementasi enkripsi dan tanda tangan digital • Kerjasama dengan BSSN dan Lembaga keamanan siber nasional 	

BAB IV
PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA
PENYELENGARAAN URUSAN

4.1. Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029

Program, kegiatan, dan sub kegiatan yang tercantum dalam Renstra Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Tahun 2025-2029 merupakan hasil *cascading* dari dokumen perencanaan pembangunan daerah. Proses *cascading* dilakukan untuk memastikan keterkaitan yang konsisten dan berjenjang antara dokumen perencanaan jangka menengah daerah dengan dokumen perencanaan perangkat daerah, sehingga setiap capaian kinerja perangkat daerah langsung berkontribusi terhadap pencapaian sasaran pembangunan daerah



Gambar 4.1 Kerangka Perumusan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan Renstra Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan daerah yang berkaitan dengan urusan komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik, Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian, dan Statistik menyusun rencana program, kegiatan, dan sub kegiatan yang menjadi instrumen operasional penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan ini merupakan penjabaran dari arah kebijakan RPJMD dan tujuan strategis Renstra, sehingga diharapkan mampu menjawab isu-isu strategis serta mendorong pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) perangkat daerah. Selain itu, penyusunan program dan kegiatan juga mempertimbangkan keterbatasan kapasitas fiskal daerah, sehingga pelaksanaannya dirancang secara bertahap, prioritas, dan berkesinambungan.

Program, kegiatan, dan sub kegiatan Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Sumedang terbagi dalam empat bidang utama, yaitu Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (KIP), Bidang Informatika, Bidang Keamanan Informasi dan Persandian (KIP) dan Bidang Statistik.

Tabel 4.1 Program Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	BASELINE 2024	2025	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN										PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
				2026		2027		2028		2029		2030		
				TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)
2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA					17.353.687.546		17.966.777.470		19.283.228.445		20.495.728.245		21.772.747.389	
2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA					7.383.029.946		7.435.056.670		7.858.234.645		8.058.234.645		8.301.260.389	
Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	90,75	91,25	91,5	7.383.029.946	92	7.435.056.670	92,5	7.858.234.645	93	8.058.234.645	93,5	8.301.260.389	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK					4.016.409.600		4.432.048.000		4.845.252.800		5.099.778.500		5.300.000.000	
Meningkatnya layanan komunikasi publik	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	-	75	76	4.016.409.600	77	4.432.048.000	78	4.845.252.800	79	5.099.778.500	80	5.300.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA					5.954.248.000		6.099.672.800		6.579.741.000		7.337.715.100		8.171.487.000	
Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	100	100	100	5.954.248.000	100	6.099.672.800	100	6.579.741.000	100	7.337.715.100	100	8.171.487.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%)	-	75	80		85		90		95		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika
	Persentase Perangkat daerah yang memanfaatkan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) (%)	100	100	100		100		100		100		100		Dinas/Badan yang menangani Bidang Komunikasi Dan Informatika

2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK					650.000.000		750.000.000		800.000.000		850.000.000		900.000.000	
2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL					650.000.000		750.000.000		800.000.000		850.000.000		900.000.000	
Meningkatnya Kualitas data Pembangunan	Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	3,24	3,24	3,26	650.000.000	3,26	750.000.000	3,28	800.000.000	3,28	850.000.000	3,3	900.000.000	Dinas/Badan yang menangani Bidang Statistik
2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN					783.719.700		850.000.000		950.000.000		975.000.000		1.000.000.000	
2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI					783.719.700		850.000.000		950.000.000		975.000.000		1.000.000.000	

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)		
2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik									
- Meningkatnya Pemanfaatan Transformasi Digital - Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Pemanfaatan Transformasi Digital; Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan Pemerintahan Daerah				Indeks Pemerintahan Digital (PEMDI) (Indeks)				
					Nilai Skor LPPD Kabupaten (Skor)				
					Meningkatnya Kapasitas dan Kapabilitas Internal Perangkat Daerah		Zona Integritas Perangkat Daerah (Nilai)		
					Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah		Nilai Sakip Perangkat Daerah (Nilai)	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
				Jumlah Ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah Yang Tepat Waktu dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			

					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	

				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Substansi)	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
				Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
				Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD (Laporan)	2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
					Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (Laporan)	2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
					Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Berita Acara)	2.16.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun (Dokumen)	2.16.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
					Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu (Subtansi)	2.16.01.2.01.0012 - Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	
					Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan (Berita Acara)	2.16.01.2.01.0013 - Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	

				Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah Yang Tertib dan Sesuai Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN (Orang/bulan)	2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	

				Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.02.0003 - Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	
				Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.02.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	
				Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
				Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan (Dokumen)	2.16.01.2.02.0006 - Pengelolaan dan Penyiapan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	
				Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD (Laporan)	2.16.01.2.02.0007 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	
			Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.03 - Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	
				Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.03.0001 - Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	

					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.16.01.2.03.0005 - Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
					Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD (Laporan)	2.16.01.2.03.0006 - Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
				Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	

					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.16.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
					Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai (Unit)	2.16.01.2.05.0001 - Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	
					Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	2.16.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
					Jumlah Dokumen Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian (Dokumen)	2.16.01.2.05.0003 - Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian (Dokumen)	2.16.01.2.05.0004 - Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	
					Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai (Dokumen)	2.16.01.2.05.0005 - Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	
					Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan (Orang)	2.16.01.2.05.0006 - Pemulangan Pegawai yang Pensiun	
					Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan (Orang)	2.16.01.2.05.0009 - Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.16.01.2.05.0010 - Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	

				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan (Orang)	2.16.01.2.05.0011 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
			Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah	
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	

					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0003 - Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	
					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	2.16.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2.16.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	
					Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu (Laporan)	2.16.01.2.06.0008 - Fasilitas Kunjungan Tamu	
					Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	2.16.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
					Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD (Dokumen)	2.16.01.2.06.0010 - Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	
				Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Memadai	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	

					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
					Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel	
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

				Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0007 - Pengadaan Aset Tetap Lainnya	
				Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0008 - Pengadaan Aset Tak Berwujud	
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0010 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	2.16.01.2.07.0011 - Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	
			Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Yang Memadai	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0003 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan (Laporan)	2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	

				Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah Yang Memadai	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	2.16.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	2.16.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	2.16.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	

					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	2.16.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
		Meningkatnya Layanan Komunikasi Publik			Indeks Keterbukaan Informasi Publik (Indeks)		
		Meningkatnya layanan komunikasi publik			Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota (%)	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	
			Jumlah Perangkat Daerah Yang Telah Mendapatkan Layanan Komunikasi dan Informasi Publik		Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

				Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media (Laporan)	2.16.02.2.01.0014 - Relasi Media	
				Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo (Komunitas)	2.16.02.2.01.0015 - Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	
				Jumlah laporan Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah yang akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika (Laporan)	2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
				Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan (Permohonan)	2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah (Rekomendasi)	2.16.02.2.01.0019 - Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	
					Persentase khalayak yang terpapar informasi publik (Persentase)	2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
					Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis (Media)	2.16.02.2.01.0021 - Pengelolaan Media Komunikasi Publik	
					Jumlah Konten Informasi Publik (Konten)	2.16.02.2.01.0023 - Penyusunan Konten	
		Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital			Nilai Kematangan Teknologi Digital (Poin)		
			Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital		Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
					Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	
					Persentase Perangkat daerah yang memanfaatkan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) (%)	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	

				Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2.16.03.2.01 - Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa (Dokumen)	2.16.03.2.01.0004 - Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	
				Persentase Pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perangkat Daerah	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	

				Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
				Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE (Dokumen)	2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
				Jumlah Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional (Layanan)	2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	
				Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo (Dokumen)	2.16.03.2.02.0026 - Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai dengan ketentuan atau regulasi tentang standar teknis dan prosedur pembangunan dan pengembangan aplikasi SPBE (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0032 - Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	
					Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (Aplikasi)	2.16.03.2.02.0034 - Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	
					Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas (Perangkat Daerah)	2.16.03.2.02.0036 - Penyediaan Akses Internet	
					Jumlah dokumen kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah (Dokumen)	2.16.03.2.02.0037 - Koordinasi penyusunan kebijakan tata kelola SPBE meliputi arsitektur, peta rencana, proses bisnis, serta penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah	
					Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas (Dokumen)	2.16.03.2.02.0038 - Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	
		Meningkatnya Kualitas Data Pembangunan			Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral Yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia (%)		

			Meningkatnya Kualitas data Pembangunan		Indeks Pembangunan Statistik (IPS) (Poin)	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	
				Jumlah Pemenuhan Data Pembangunan	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.2.01 - Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk (%)	2.20.02.2.01.0018 - Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	
					Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data. (%)	2.20.02.2.01.0019 - Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	
NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik (Orang)	2.20.02.2.01.0020 - Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	
		Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah			Score Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) (Skor)		
			Tingkat Keamanan Informasi Pemerintah Daerah		Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah (%)	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	

				Persentase Indeks KAMI	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01 - Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik (Laporan)	2.21.02.2.01.0005 - Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	
					Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan (Laporan)	2.21.02.2.01.0006 - Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)
					Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian (Perangkat Daerah)	2.21.02.2.01.0007 - Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
					Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian (Dokumen)	2.21.02.2.01.0008 - Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	
				Persentase Titik Yang Diamankan dan Diterapkan Pemerintah Daerah Berdasarkan Pola Hubungan Komunikasi Sandi	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	2.21.02.2.02 - Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	
					Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah. (Kegiatan)	2.21.02.2.02.0002 - Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	

4.2. Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029

Rencana program, kegiatan, sub kegiatan dan pendanaan dalam Rencana Strategis Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 disusun sebagai penjabaran operasional dari tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan yang telah ditetapkan. Penyusunan rencana ini dilakukan secara sistematis dan terukur berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja sebelumnya serta mempertimbangkan isu strategis prioritas, yaitu peningkatan kualitas pelayanan publik yang berkualitas dan inklusif.

Program yang direncanakan terdiri atas rangkaian intervensi yang akan dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam menyelenggarakan pemerintahan, diantaranya program komunikasi dan informasi publik, program pengelolaan aplikasi informatika, program penyelenggaraan statistik sektoral dan program penyelenggaraan persandian untuk pengamanan informasi. Masing-masing program dijabarkan lebih lanjut ke dalam kegiatan dan sub kegiatan yang memiliki keluaran (*output*) yang jelas dan terukur, serta berorientasi pada pencapaian *outcome* yaitu :

1. Meningkatnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah;
2. Meningkatnya aksesibilitas dan kepuasan masyarakat terhadap layanan publik;
3. Terwujudnya perencanaan dan pengambilan keputusan pembangunan yang lebih tepat sasaran melalui pemanfaatan

data statistic sektoral yang akurat, mutakhir, terpadu dan dapat dipertanggungjawabkan;

4. Meningkatkan sistem keamanan informasi pemerintah daerah.

Untuk menjamin efektivitas pelaksanaannya, setiap program, kegiatan, dan sub kegiatan dilengkapi dengan rencana kebutuhan pendanaan yang disesuaikan dengan kemampuan fiskal daerah. Alokasi anggaran diprioritaskan pada kegiatan strategis yang mendukung peningkatan kualitas sarana dan prasarana pelayanan, penguatan kapasitas aparatur, digitalisasi layanan, serta perluasan akses dan partisipasi masyarakat. Pendekatan pendanaan dilakukan secara berkelanjutan dan bertahap agar implementasi program mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat, sekaligus mendorong terciptanya tata kelola pemerintahan yang lebih profesional, transparan, dan akuntabel.

Dengan rencana program dan pembiayaan yang terarah, diharapkan seluruh rangkaian kebijakan dalam Renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 dapat dilaksanakan secara konsisten dan berkesinambungan, serta menghasilkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat.

Program, kegiatan dan sub kegiatan serta pendanaan yang dilaksanakan oleh Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik Tahun 2025-2029 dapat dilihat pada Tabel 4.2 dibawah ini :

2	16	0 1	2 0 0 1	0 0 0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	5.000.000	1	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	1 Dokumen	6.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	0 1	2 0 0 1	0 0 0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen 5Perubahan RKA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	5.000.000	1	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	0 1	2 0 0 1	0 0 0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPASKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	5.000.000	1	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	0 1	2 0 0 1	0 0 0 5	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	5.000.000	1	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	1 Dokumen	4.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	0 1	2 0 0 1	0 0 0 6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Kinerja Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	5 Laporan	5		5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	5	35.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	0 1	2 0 0 1	0 0 0 7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Laporan				3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	3	3.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

2	16	01	201	10	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Berita Acara			1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	201	11	Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	Jumlah Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD yang disusun	Dokumen			6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	6	10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	201	12	Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Jumlah Subtansi Koordinasi Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Daerah yang Diampu	Substansi			1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	201	13	Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Jumlah Berita Acara Hasil Sinkronisasi dan Harmonisasi Pusat dan Daerah dalam Rangka Mendukung Target Pembangunan Nasional melalui Koordinasi Teknis Pembangunan	Berita Acara			1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

2	16	01	202		Administrasi Keuangan	Persentase Ketersediaan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang tertib dan sesuai peraturan perundang-undangan	Laporan	12 Laporan	12	6.120.185.552	12	5.927.823.946	12	5.972.895.670	12	6.143.204.145	12	6.145.246.145	12	6.175.176.139		Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	202	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Orang/Bulan	41 Orang/Bulan	41	6.042.685.552	41	5.894.823.946	41	5.939.895.670	41	6.110.204.145	41	6.112.246.145	41	6.142.176.139		Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	202	3	Pelaksanaan Penatuesahan dan pengujian/verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatuesahan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	20.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	202	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi SKPD	Dokumen				12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	202	5	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Laporan				1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	202	6	Pengelolaan dan Penyediaan Bahan Tanggapan Pemeriksaan	Jumlah Dokumen Bahan Tanggapan Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Pemeriksaan	Dokumen				1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000		Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

2	16	01	202	7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan/Semesteran SKPD	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	57.500.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	12	10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	1	203		Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Persen	100 Persen	100	17.000.000	100	18.700.000	100	18.700.000	100	18.700.000	100	18.700.000	100	18.700.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	1	203	1	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Dokumen	1 Dokumen	1	5.000.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	1	5.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	1	203	5	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12 Laporan	12 Laporan	7.000.000	12	7.700.000	12	7.700.000	12	7.700.000	12	7.700.000	12	7.700.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	1	203	6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Laporan	12 Laporan	12 laporan	5.000.000	12	5.500.000	12	5.500.000	12	5.500.000	12	5.500.000	12	5.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	205		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Memadai	Persen	100 Persen	100	25.000.000	100	81.000.000	100	81.300.000	100	91.630.000	100	141.993.000	100	142.392.300	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	205	1	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Unit			-	1	-	1	-	1	10.000.000	1	10.000.000	1	10.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

2	16	01	205	2	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Paket			1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang		
2	16	01	205	3	Pendaftaran dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Jumlah Data Kepegawaian yang dikelola	Dokumen	3 Dokumen	3	25.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	3	5.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang	
2	16	01	205	4	Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pelaksanaan Sistem Informasi Kepegawaian	Dokumen			1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	1	3.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	205	5	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Dokumen			12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	205	6	Pemulangan Pegawai yang Pensiun	Jumlah Pegawai Pensiun yang Dipulangkan	Orang			1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	205	9	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan	Orang			1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	205	10	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Orang			70	3.000.000	70	3.300.000	70	3.630.000	70	3.993.000	70	4.392.300	70	4.392.300	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

2	16	01	205	11	Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan	Jumlah aparatur yang mengikuti peningkatan kapasitas	Orang			70	12.000.000	70	12.000.000	70	12.000.000	70	12.000.000	70	12.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang	
2	16	01	206		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Ketersediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah yang Memadai	Persen	100 Persen	100	510.335.750	100	260.606.000	100	268.861.000	100	332.441.500	100	412.445.500	100	441.884.450	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	206	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket			1	10.000.000		-		-		-		-	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang	
2	16	01	206	2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	2 Paket	2	150.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	1	25.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	206	3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	25.000.000	1	27.500.000	1	30.250.000	1	33.275.000	1	36.602.500	1	40.262.750	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	206	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	75.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	75.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	206	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	1 Paket	1	8.055.750	1	8.056.000	1	8.056.000	1	8.056.000	1	8.056.000	1	8.056.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

2	16	01	206	6	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Dokumen	1 Dokumen	1	32.280.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	1	30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang		
2	16	01	206	8	Fasilitas Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu	Laporan				1	5.050.000	1	5.555.000	1	6.110.500	1	7.787.000	1	8.565.700	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	206	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	12 Laporan	12	220.000.000	12	100.000.000	12	110.000.000	12	150.000.000	12	175.000.000	12	200.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	206	10	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	12 Laporan				12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	12	5.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	207		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Ketersediaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang memadai	Persen	100 Persen	100	120.000.000	100	130.000.000	100	140.000.000	100	160.000.000	100	160.000.000	100	226.602.500	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	207	1	Pengadaan Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Unit							-		-		-		-	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	207	2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	Unit				1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	1	20.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

2	16	01	207	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Unit				1	10.000.000	1	10.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	3	30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	207	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Unit	10 Unit	10	120.000.000	10	100.000.000	10	110.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	10	120.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	207	7	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Unit Aset Tetap Lainnya yang Disediakan	Unit					-				-				-	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	207	8	Pengadaan Aset Tak Berwujud	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit					-				-				-	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	207	9	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					-				-				-	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	207	10	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit					-				-				-	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

2	16	01	207	11	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	Unit											56.602.500	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang		
2	16	01	208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Ketersediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Persen	100 Persen	100	654.000.000	100	662.900.000	100	670.000.000	100	675.500.000	100	681.550.000	100	688.205.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	208	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	89.000.000	12	97.900.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	12	100.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	208	3	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	50.000.000	12	50.000.000	12	55.000.000	12	60.500.000	12	66.550.000	12	73.205.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	208	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12 Laporan	12	515.000.000	12	515.000.000	12	515.000.000	12	515.000.000	12	515.000.000	12	515.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	209		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang memadai	Persen	100 Persen	100	280.000.000	100	180.000.000	100	180.000.000	100	333.459.000	100	395.000.000	100	505.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

2	16	01	209	1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit			6	50.000.000	6	50.000.000	6	75.000.000	6	100.000.000	6	110.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang	
2	16	01	209	2	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perijinan Kendaraan Dinas Opearsional Atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	Unit	22 Unit	22	20.000.000	16	5.000.000	16	5.000.000	16	10.000.000	16	15.000.000	16	15.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	209	6	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	10 Unit	10 Unit	15.000.000	10	25.000.000	10	25.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	10	30.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	01	209	9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Paket	1 Paket	2	245.000.000	1	100.000.000	1	100.000.000	2	218.459.000	2	250.000.000	2	350.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	02			PROGRAM INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan Prioritas Pemerintah dan Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten	Persen	75	75	2.180.000.000	76	3.716.409.600	77	4.132.048.000	78	4.545.252.800	79	4.799.778.500	80	5.000.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

2	16	02	201		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah	Indikator Keluaran Kegiatan : Jumlah Perangkat Daerah yang telah mendapatkan layanan komunikasi dan informasi publik	Persen	100 Persen	100	2.180.000.000	100	3.716.409.600	100	4.132.048.000	100	4.545.252.800	100	4.799.778.500	100	5.000.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	02	201	14	Relasi Media	Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media	Laporan						1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	02	201	15	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo	Komunitas	26 Komunitas	26	260.000.000	26	445.284.100	26	489.813.000	26	538.794.300	26	552.674.000	26	560.491.400	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	02	201	16	Dukungan Administratif, Keuangan, Dan Tata Kelola Komisi Informasi Didaerah Dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	Jumlah Laporan Dukungan Administrasi f, Keuangan Dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah Yang Akuntabel serta disampaikan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika	Laporan	1 Laporan	-	-	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	1	300.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	02	201	17	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik	Dokumen	1 Dok	1	670.000.000	1	442.350.000	1	486.585.000	1	535.243.500	1	550.768.000	1	570.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

2	16	02	201	19	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah	Rekomendasi		4	150.000.000	4	250.000.000	4	275.000.000	4	302.500.000	4	331.250.000	4	350.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	02	201	20	Diseminasi Informasi	Persentase khalayak yang terpapar informasi publik	Persentase		100	100.000.000	100	500.000.000	100	550.000.000	100	605.000.000	100	610.000.000	100	620.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	02	201	21	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis	Media		3	1.000.000.000	3	1.369.093.200	3	1.500.000.000	3	1.650.000.000	3	1.750.000.000	3	1.850.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	02	201	23	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Konten				1200	709.682.300	1200	780.650.000	1200	858.715.000	1200	944.586.500	1200	982.958.600	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Persentase Perangkat Daerah Menggunakan Layanan Publik Berbasis Elektronik	Persen	100 Persen	100	7.208.279.100	100	5.954.248.000	100	6.099.672.800	100	6.579.741.000	100	7.337.715.100	100	8.171.487.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

2	16	03	201		Pengelolaan Nama Domain Yang Telah Ditetapkan Oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Sub Domain Perangkat Daerah	Perangkat Daerah	54 PD	54	150.000.000	54	150.000.000	54	165.000.000	54	181.500.000	54	199.650.000	54	219.615.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	03	201	2	Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa	Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa	Dokumen	2 Dok	2	150.000.000	2	150.000.000	2	165.000.000	2	181.500.000	2	199.650.000	2	219.615.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	03	202		Pengelolaan E-government Di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator Keluaran Kegiatan : Persentase pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Perangkat Daerah	Persen	100 Persen	100	7.058.279.100	100	5.804.248.000	100	5.934.672.800	100	6.398.241.000	100	7.138.065.100	100	7.951.872.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	03	202	0015	Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda	Laporan	12 Laporan	12	480.000.000											Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	03	202	0019	Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Jumlah Dokumen Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	Dokumen				1	480.000.000	1	480.000.000	1	480.000.000	1	480.000.000	1	480.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

2	16	03	2025	025	Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	Jumlah Layanan Pemdada yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional	Layanan				1	30.000.000	1	33.000.000	1	36.300.000	1	39.930.000	1	43.923.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	03	2022	026	Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo	Dokumen				1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	03	2022	18	Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah	Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan	Dokumen				1	200.000.000	1	220.000.000	1	242.000.000	1	266.200.000	1	292.820.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	03	2022	030	Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE	Jumlah Perangkat Daerah yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	54 Perangkat Daerah	54 Perangkat Daerah	54	5.758.279.100											Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	16	03	2022	032	Koordinasi pembangunan dan/atau pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah, serta pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE	Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah	Aplikasi	3 Aplikasi	3	420.000.000	3	445.000.000	3	489.500.000	3	538.450.000	3	592.295.000	3	651.524.500	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

2	16	03	20324	00	Penyelenggaraan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah dalam rangka interoperabilitas data dan integrasi layanan	Jumlah Aplikasi SPBE yang terhubung dengan Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah	Aplikasi			3	25.000.000	3	27.500.000	3	30.250.000	3	33.275.000	3	36.602.500	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang	
2	16	03	20326	00	Penyediaan Akses Internet	Jumlah Perangkat Daerah dan UPTD yang memanfaatkan akses internet yang disediakan oleh Dinas	Perangkat Daerah			54	4.324.248.000	54	4.354.672.800	54	4.708.241.000	54	5.327.065.100	54	6.007.772.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang	
2	16	03	20328	00	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/ Kota Cerdas	unit	54 PD	54	400.000.000	250.000.000	54	275.000.000	54	302.500.000	54	332.750.000	54	366.025.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang	
2	20	02			PROGRAM PENYELANGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Persentase Perangkat Daerah Yang Menggunakan Data Statistik	Persen	100 Persen	100	302.426.000	100	650.000.000	100	750.000.000	100	800.000.000	100	850.000.000	100	900.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	20	02	201		Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/ Kota	Jumlah Pemenuhan Data Pembangunan	Dokumen	2	2	302.426.000	2	650.000.000	2	750.000.000	2	800.000.000	2	850.000.000	2	900.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	20	02	2010	00	Penyelenggaraan Statistik Sektoral yang sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia	Jumlah kegiatan statistik sektoral yang telah dilengkapi metadata	Dokumen	1 Dokumen	1	152.426.000											Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

2	20	0	2	0	Pemenuhan Prinsip Satu Data Indonesia	Persentase kegiatan statistik sektoral yang telah memenuhi standar data, metadata, interoperabilitas data dan kode referensi dan/atau data induk	Persen	N/A		100	225.000.000	100	275.000.000	100	275.000.000	100	300.000.000	100	325.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang	
2	20	0	2	0	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Persen	N/A		100	250.000.000	100	275.000.000	100	300.000.000	100	325.000.000	100	350.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang	
2	20	0	2	0	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Orang	54 Orang	54	150.000.000	54	175.000.000	54	200.000.000	54	225.000.000	54	225.000.000	54	225.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	21	0	2		PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Persentase Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Persen		73,53	1.430.000.000	76,25	783.719.700	78,97	850.000.000	81,69	950.000.000	84,42	975.000.000	87,14	1.072.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	21	0	2		Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota	Indikator Keluaran Kegiatan : Persentase indeks KAMI	Persen		73,53	1.210.000.000	76,25	658.719.700	78,97	720.000.000	81,69	807.000.000	84,42	825.000.000	87,14	907.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	21	0	2	0	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Laporan	12 Laporan	12	550.000.000	12	375.000.000	12	400.000.000	12	425.000.000	85,27	425.000.000	12	467.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

2	21	0 2	2 0 1	0 0 6	Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Jumlah Laporan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan Analisis Kebutuhan	Laporan	12 Laporan	12	165.000.000	12	75.000.000	12	80.000.000	12	90.000.000	12	95.000.000	12	104.500.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	21	0 2	2 0 1	0 0 7	Penyediaan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi dan Persandian	Perangkat Daerah	54 PD	54	385.000.000	54	158.719.700	54	185.000.000	54	231.500.000	54	238.450.000	54	262.295.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	21	0 2	2 0 1	0 0 8	Penetapan Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Kebijakan Tata Kelola Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah yang Ditetapkan baik berupa Peraturan Gubernur, Keputusan Gubernur maupun Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang digunakan sebagai panduan dalam menjalankan penyelenggaraan persandian	Dokumen	1 Dok	1	110.000.000	1	50.000.000	1	55.000.000	1	60.500.000	1	66.550.000	1	73.205.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
2	21	0 2	2 0 2		Penetapan Pola Hubungan Komunikasi Sandi Antar Perangkat Daerah Kabupaten/ Kota	Persentase titik yang diamankan dan diterapkan Pemerintah daerah berdasarkan pola hubungan komunikasi sandi	Persen		100	220.000.000	100	125.000.000	100	130.000.000	100	143.000.000	100	150.000.000	100	165.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

2	21	0	2	0	Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah	Jumlah Operasionalisasi Layanan Keamanan Informasi dan Persandian Pemerintah Daerah berdasarkan pemetaan pola hubungan komunikasi sandi pemerintah Daerah.	Kegiatan	1	220.000.000	1	125.000.000	1	130.000.000	1	143.000.000	1	150.000.000	1	165.000.000	Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang
									18.895.226.402		18.787.407.246		19.566.777.470		21.033.228.445		22.320.728.245		23.445.247.389	

Secara keseluruhan, tabel ini memberikan gambaran operasional yang terukur bagi perangkat daerah dalam merumuskan Renstra. Semua sasaran disusun linier, mulai dari NSPK, tujuan, sasaran, outcome, hingga output yang dapat diverifikasi melalui indikator kinerja kuantitatif. Rangkaian program/kegiatan/sub kegiatan ini menjadi pedoman implementasi bagi Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, penguatan akuntabilitas, hingga pencapaian tata kelola pemerintahan yang profesional, transparan, dan akuntabe

Tabel 4.4 Daftar Sub Kegiatan dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

NO	PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN / SUBKEGIATAN	KETERANGAN
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik				
1.	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Meningkatnya akuntabilitas kinerja Perangkat Daerah	2.16.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.01.0002 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	
			2.16.01.2.01.0003 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
			2.16.01.2.01.0004 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	
			2.16.01.2.01.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	
			2.16.01.2.01.0006 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
			2.16.01.2.01.0007 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.01.0010 - Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.01.0011 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Urusan Selain Renstra PD dan Renja PD	
			2.16.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
			2.16.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
			2.16.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
			2.16.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
2.16.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				
2.	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya layanan komunikasi publik	2.16.02.2.01 - Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.02.2.01.0016 - Dukungan Administratif, Keuangan, dan Tata Kelola Komisi Informasi di Daerah dalam Rangka Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0017 - Pelayanan Informasi Publik	
			2.16.02.2.01.0020 - Diseminasi Informasi	
3.	2.16.03 - PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Meningkatnya Kualitas Layanan Publik Melalui Pemanfaatan Teknologi Digital	2.16.03.2.02 - Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	
			2.16.03.2.02.0019 - Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE	
			2.16.03.2.02.0025 - Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi	

4.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran kunci yang digunakan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan Rencana Strategis pada tingkat perangkat daerah. IKU berfungsi sebagai alat untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang dilaksanakan mampu memberikan dampak nyata dan berkontribusi langsung terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Indikator Kinerja Utama (IKU) merupakan ukuran keberhasilan utama yang mencerminkan pencapaian visi, misi, dan tujuan strategis DiskominfoSanditik dalam penyelenggaraan urusan komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik. IKU disusun secara terukur, relevan, dan selaras dengan arah kebijakan pembangunan daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta mendukung pencapaian target nasional.

Penetapan IKU Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik bertujuan untuk:

1. Menjadi tolok ukur keberhasilan kinerja perangkat daerah dalam mendukung pembangunan daerah.
2. Memberikan fokus prioritas pada capaian yang berdampak langsung terhadap kualitas layanan publik di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik.
3. Mendorong tata kelola pemerintahan yang berbasis data, informasi, dan teknologi digital yang transparan,

akuntabel, serta adaptif terhadap perkembangan era digital.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
	2.16.2.20.2.21.04.0000 - Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik									
1.	Zona Integritas Perangkat Daerah	Nilai	93,85	93,85	94,85	95,35	95,85	96,35	96,85	
2.	Persentase Masyarakat dalam Memahami Program-Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang	%		70	-	-	-	-	-	
	Indeks Keterbukaan Informasi Publik	Indeks	-	-	91	92	93	94	95	
3.	Indeks Layanan SPBE	Poin	4,69	4,70	-	-	-	-	-	
	Nilai Kematangan Teknologi Digital	Poin	-	-	2	2,2	2,4	2,6	2,8	
4.	Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	Poin	-	3,24	-	-	-	-	-	
	Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektorial Yang Sesuai Dengan Prinsip Satu Data Indonesia	%	-	-	60	70	80	90	100	
5.	Score Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI)	Skor	450	675	700	725	750	775	800	

Dari tabel 4.5 diatas dapat dilihat bahwa untuk Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang untuk periode tahun 2025-2029 dapat dijelaskan sebagai berikut :

1. Persentase Masyarakat dalam Memahami Program-Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang.

Indikator ini mengukur tingkat pemahaman masyarakat terhadap program-program prioritas/unggulan yang ditetapkan oleh Bupati dan Wakil Bupati Sumedang. Pemahaman dimaksud adalah sejauh mana masyarakat mengetahui, mengerti, dan memahami tujuan, manfaat, serta dampak dari program unggulan yang dilaksanakan

pemerintah daerah. Tujuan yang ingin dicapai pada indikator ini adalah menilai keberhasilan komunikasi publik pemerintah daerah dalam menyosialisasikan program unggulan secara luas dan efektif, mengukur tingkat literasi masyarakat terhadap kebijakan pembangunan daerah, dan Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung dan mengawal pelaksanaan program unggulan.

Adapun manfaat yang dapat diperoleh adalah :

- Sebagai tolak ukur kinerja Diskominfosanditik dalam mengkomunikasikan program pemerintah
- Menjadi dasar evaluasi strategi komunikasi publik agar lebih tepat sasaran (segmentasi audiens, media yang digunakan, bahasa komunikasi, dan kanal informasi)
- Mendukung tercapainya visi pembangunan Kabupaten Sumedang melalui partisipasi masyarakat yang lebih luas

Akan tetapi indikator ini hanya dipakai sebagai IKU Kepala Dinas sampe Tahun 2025, untuk Tahun 2026 sampai dengan Tahun 2029 IKU Bidang Informasi dan Komunikasi Publik Ini menjadi Indeks Keterbukaan Informasi Publik. Sedangkan untuk IKU Persentase Masyarakat dalam Memahami Program-Program Unggulan Bupati dan Wakil Bupati Sumedang untuk Tahun 2026-2029 diampu sebagai indikator Program dengan pengampu Kepala Bidang Informasi dan Komunikasi Publik (IKP).

Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) adalah ukuran tingkat keterbukaan badan publik dalam memberikan informasi kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik. IKIP menggambarkan sejauh mana prinsip transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik terwujud dalam penyelenggaraan pemerintahan

daerah. Tujuan dilakukan pengukuran indeks keterbukaan informasi publik diantaranya adalah :

- Mengukur kepatuhan pemerintah daerah terhadap regulasi keterbukaan informasi.
- Menjadi indikator transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan.
- Menilai tingkat aksesibilitas masyarakat terhadap informasi publik.
- Meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah daerah.

Adapun manfaat dilakukan pengukuran IKIP Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik adalah :

- Memberikan gambaran objektif tingkat keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sumedang.
- Mendorong pemerintah daerah untuk terus meningkatkan kualitas layanan informasi publik.
- Memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan dan memperbesar peluang tercapainya *good governance*.
- Meningkatkan citra positif pemerintah daerah di mata masyarakat.

2. Indeks Layanan SPBE

SPBE adalah ukuran keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik di instansi pemerintah. Ruang lingkup pengukurannya mencakup 4 domain besar, yaitu :

1. Kebijakan Internal SPBE

- Ketersediaan regulasi, pedoman, dan dokumen perencanaan SPBE.

- Misalnya : Perbup tentang SPBE, arsitektur SPBE daerah, masterplan TIK.
2. **Tata Kelola SPBE**
 - Kelembagaan, manajemen risiko, keamanan informasi, dan pengendalian layanan digital.
 - Termasuk unit kerja pengelola TIK (DiskominfoSanditik).
 3. **Manajemen SPBE**
 - Pengelolaan SDM TIK, aplikasi, infrastruktur, data, keamanan, dan layanan publik digital.
 4. **Layanan SPBE**
 - Implementasi layanan administrasi pemerintahan digital dan layanan publik digital (e-office, e-planning, aplikasi layanan masyarakat, Satu Data, dan portal layanan).

Indeks SPBE ini hanya dievaluasi dan diterapkan sampai dengan tahun 2025 dan untuk tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 sesuai dengan arahan KemenPANRB bahwa untuk mengukur transformasi digital pemerintahan secara lebih komprehensif dengan menggunakan Indeks Pemerintahan Digital (Indeks Pemdi). Keterkaitan antara indeks SPBE dengan indeks pemdi adalah indeks SPBE mengukur aspek tata kelola, manajemen dan layanan digital sedangkan indeks pemdi menilai kematangan digital pemerintah secara lebih luas, termasuk inovasi dan keterhubungan layanan. Indeks Pemdi ini ini diampu sebagai Indikator Kepala Daerah (Bupati) dan menjadi indikator tujuan renstra Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik Kabupaten Sumedang.

Nilai kematangan teknologi digital sebagai Indikator Kinerja Utama DiskominfoSanditik yang diterapkan dan diukur mulai dari tahun 2026 sampai dengan tahun 2029 mempunyai tujuan untuk mengukur sejauh mana

organisasi/pemerintah daerah memanfaatkan teknologi digital dalam tata kelola, layanan dan inovasi.

3. Nilai Indeks Pembangunan Statistik (IPS)

Indeks Pembangunan Statistik merupakan instrumen yang dikembangkan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) untuk mengukur capaian pembangunan statistik di pemerintah daerah dan merupakan rencana aksi satu data Indonesia.

Indeks Pembangunan Statistik ini sesuai dengan renstra RPD 2024-2026 masa transisi kepemimpinan kepala daerah hanya diukur di tahun 2025 dan mekanisme penilaian IPS dilaksanakan 2 tahun sekali. Untuk tahun 2026-2029 Nilai IPS diganti dengan persentase ketersediaan data statistik sektoral yang sesuai dengan prinsip satu data Indonesia (SDI).

Persentase Ketersediaan Data Statistik Sektoral yang Sesuai dengan Prinsip Satu Data Indonesia (SDI) adalah indikator kinerja yang mengukur sejauh mana data sektoral yang dikelola perangkat daerah telah memenuhi prinsip SDI sebagaimana diatur dalam Perpres No. 39 Tahun 2019.

4. Skor Indeks Keamanan Informasi (KAMI)

Indeks Keamanan Informasi (KAMI) adalah instrumen evaluasi dari BSSN untuk mengukur tingkat kesiapan (maturity level) penerapan keamanan informasi di instansi pemerintah/organisasi.

Instrumen ini membantu melihat apakah suatu instansi sudah memiliki kebijakan, proses, dan teknologi pengamanan informasi yang memadai. Adapun 5 area penghitungan skor indeks keamanan informasi (KAMI) meliputi :

1. Tata Kelola keamanan informasi (Kebijakan, komitmen pimpinan, struktur organisasi, dan program kerja keamanan informasi)
2. Pengelolaan risiko keamanan informasi (Identifikasi, analisis mitigasi dan pemanyauan risiko)
3. Kerangka kerja pengelolaan keamanan informasi (Prosedur, satndar, SOP dan kepatuhan regulasi)
4. Pengelolaan aset informasi (inventarisasi aset, Kalsifikasi data dan pengendalian akses)
5. Teknologi dan keamanan informasi (Infrastruktur keamanan)

4.4. Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi Dan Informatika, Persandian Dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2025-2029.

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik merupakan ukuran utama keberhasilan perangkat daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik. IKK berfungsi sebagai tolok ukur pencapaian sasaran strategis Diskominfosanditik, yang secara langsung berkontribusi terhadap pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Penetapan IKK didasarkan pada regulasi perencanaan pembangunan daerah serta prinsip **SMART** (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound). Dengan demikian, indikator yang digunakan benar-benar menggambarkan outcome utama dari pelaksanaan program dan kegiatan Diskominfosanditik

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Komunikasi dan Informatika, Persandian dan Statistik

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA										
1.	Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota	positif	%	-	75	76	77	78	79	80	
2.	Persentase Perangkat Daerah (PD) dan/atau unit pelaksana teknis daerah yang terhubung dengan akses internet yang disediakan oleh Dinas Kominfo	kumulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
3.	Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah	positif	%	-	75	80	85	90	95	100	

4.	Persentase Perangkat daerah yang memanfaatkan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah (SPLPD)	komulatif	%	100	100	100	100	100	100	100	
II.	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK										
5.	Indeks Pembangunan Statistik (IPS)	positif	Poin	3,24	3,24	3,26	3,26	3,28	3,28	3,30	
III.	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN										
6.	Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	positif	%	85,12	73,53	76,25	78,97	81,69	84,42	87,14	

Berdasarkan tabel 4.6 diatas, IKK Diskominfo sanditik mencakup 3 urusan diantaranya ; urusan komunikasi dan informatika, urusan persandian dan urusan statistik. Untuk urusan komunikasi dan informatika sesuai dengan yang tertera didalam pedoman umum peyusunan LPPD Tahun 2024 Kabupaten Sumedang yang dikeluarkan oleh kemendagri RI terdiri dari 4 (empat) indikator kinerja kunci yaitu :

1. Persentase Masyarakat yang menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, mengetahui Kebijakan Prioritas Pemerintah dan Program Prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten.

Indikator ini mengukur sejauh mana efektivitas kegiatan penyebarluasan informasi publik yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik. Persentase masyarakat yang mengetahui kebijakan prioritas dihitung dari jumlah masyarakat yang menjadi sasaran sosialisasi/penyebarluasan informasi publik dan mengaku memahami informasi yang disampaikan dibandingkan dengan jumlah masyarakat yang dijadikan target penyebaran informasi. Indikator ini juga mencerminkan transparansi dan keterbukaan informasi publik dan menjadi tolak ukur keberhasilan Diskominfo sanditik dalam mendukung partisipasi masyarakat terhadap pembangunan daerah serta berkontribusi terhadap indeks keterbukaan informasi dan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah daerah.

Ruang lingkup pengukuran indikator ini meliputi informasi publik yang disebarluaskan termasuk didalamnya program unggulan pemerintah pusat dan daerah, kebijakan prioritas daerah (RPJMD) serta isu isu strategis pembangunan.

2. Persentase Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terhubung dengan Akses Internet yang disediakan oleh DiskominfoSanditik.

Indikator ini mengukur tingkat keterhubungan Organisasi Perangkat Daerah (Dinas/Badan/Kantor) termasuk Kecamatan dan kelurahan dengan jaringan internet yang disediakan oleh DiskominfoSanditik. Akses internet dimaksud adalah layanan konektivitas yang dikelola secara terpusat untuk mendukung kelancaran komunikasi data, pengelolaan aplikasi pemerintahan, layanan publik digital, serta mendukung penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)/Indeks pemerintahan digital (Pemdi) di lingkungan Pemerintah Kabupaten. Penyediaan layanan internet terpusat ini menjadi tolak ukur ketersediaan infrastruktur digital pemerintah daerah, Mendukung terwujudnya efisiensi pembiayaan internet, memberikan jaminan kualitas dan keamanan jaringan melalui satu pintu layanan DiskominfoSanditik dan sejalan dengan upaya penguatan SPBE/Indeks Pemdi, integrasi aplikasi, dan pengembangan layanan publik digital.

3. Persentase Perangkat Daerah (PD) di tingkat Kabupaten/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah.

Indikator ini Menggambarkan tingkat keterhubungan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan jaringan intra pemerintah daerah (intranet pemerintah). Jaringan intra ini menjadi tulang punggung komunikasi data dan informasi antar PD untuk mendukung integrasi sistem pemerintahan digital

4. Persentase Perangkat Daerah yang memanfaatkan sistem penghubung layanan Pemerintah Daerah (SPLPD).

Sistem Penghubung Layanan Pemerintah Daerah (SPLPD) merupakan infrastruktur strategis yang berfungsi sebagai tulang punggung komunikasi dan integrasi layanan antar Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota. SPLPD dibangun untuk mewujudkan keterhubungan, keterpaduan, dan keamanan jaringan intra pemerintah daerah sehingga mampu mendukung terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, dan terintegrasi.

Keberadaan SPLPD menjadi fondasi penting dalam percepatan transformasi digital di daerah, terutama dalam mendukung implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta pencapaian Indeks Pemerintahan Digital. Melalui SPLPD, pertukaran data, informasi, maupun layanan antar perangkat daerah dapat dilakukan secara lebih cepat, aman, dan terstandar. Hal ini sekaligus mengurangi potensi terjadinya silo data, meningkatkan efisiensi administrasi, serta memperkuat kualitas pelayanan publik berbasis digital.

Lebih jauh, SPLPD juga menjadi instrumen penghubung antara sistem informasi di daerah dengan sistem nasional, seperti Satu Data Indonesia, layanan administrasi kependudukan, maupun aplikasi layanan publik lintas sektor. Dengan demikian, keberadaan SPLPD tidak hanya meningkatkan kinerja internal pemerintah daerah, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat melalui tersedianya layanan publik yang lebih mudah diakses, transparan, dan responsive. Tujuan dilaksanakan pengukuran indikator ini adalah selain mendukung percepatan transformasi digital pemerintah daerah juga dapat memastikan keamanan, kehandalan dan ketersediaan jaringan intra pemerintah daerah.

5. Indeks Pembangunan Statistik (IPS).

Indeks Pembangunan Statistik (IPS) merupakan salah satu ukuran kinerja yang digunakan untuk menilai sejauh mana pembangunan statistik di daerah telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip *Satu Data Indonesia*. IPS mencerminkan tingkat keterpaduan, ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data statistik sektoral dalam mendukung perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi pembangunan daerah.

Bagi Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik, keberadaan IPS memiliki peran strategis karena menjadi instrumen untuk mendorong peningkatan tata kelola data yang lebih baik di lingkungan Pemerintah Daerah. Peningkatan nilai IPS mencerminkan semakin baiknya kolaborasi antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam menyediakan data yang valid, mutakhir, dan mudah diakses, sehingga dapat digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan pembangunan.

Dalam periode perencanaan strategis tahun 2025–2029, DiskominfoSanditik menargetkan peningkatan capaian nilai IPS melalui berbagai strategi, antara lain:

1. Penguatan regulasi dan kelembagaan pengelolaan data statistik sektoral di daerah.
2. Optimalisasi peran Walidata sebagai penghubung utama dalam pengelolaan dan verifikasi data sektoral.
3. Peningkatan kapasitas SDM pengelola data di masing-masing OPD.
4. Pemanfaatan teknologi informasi untuk mendukung sistem integrasi dan interoperabilitas data.
5. Sosialisasi dan advokasi prinsip Satu Data Indonesia, sehingga seluruh pemangku kepentingan memiliki

pemahaman yang sama tentang pentingnya data yang berkualitas.

6. Tingkat Kesiapan Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah.

Indikator ini menilai sejauh mana pemerintah daerah memiliki kemampuan untuk menjaga kerahasiaan, integritas dan ketersediaan informasi, menjadi acuan dalam menyusun program peningkatan keamanan informasi, dan mengurangi potensi kebocoran data, serangan siber dan gangguan layanan publik Pemerintahan Kabupaten Sumedang. Pengukuran tingkat kesiapan pengamanan informasi pemerintah daerah dilakukan melalui instrumen Indeks Keamanan Informasi (Indeks KAMI) yang dikembangkan oleh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN). Indeks ini menilai kesiapan tata kelola keamanan informasi pada lima area utama, yaitu:

1. Tata Kelola Keamanan Informasi
2. Pengelolaan Risiko Keamanan Informasi
3. Kerangka Kerja Pengamanan Informasi
4. Pengelolaan Aset Informasi
5. Teknologi dan Aspek Keamanan

Dalam periode perencanaan strategis tahun 2025–2029, Diskominfosanditik menargetkan peningkatan tingkat kematangan keamanan informasi melalui strategi sebagai berikut:

1. Penguatan regulasi dan kebijakan keamanan informasi yang mendukung pelaksanaan SPBE dan transformasi digital.
2. Peningkatan kapasitas SDM di bidang persandian, keamanan siber, dan manajemen risiko.

3. Pengembangan infrastruktur pengamanan informasi, termasuk sistem deteksi dini dan perlindungan data pemerintah daerah.
4. Penerapan standar keamanan informasi sesuai pedoman BSSN dan praktik terbaik internasional.
5. Peningkatan kesadaran aparaturnya pemerintah daerah terhadap pentingnya keamanan informasi melalui sosialisasi, edukasi, dan simulasi penanganan insiden siber.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian, dan Statistik Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 disusun sebagai pedoman dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang komunikasi dan informatika, persandian, serta statistik.

Renstra ini merupakan penjabaran dari RPJMD Kabupaten Sumedang 2025–2029 dan menjadi dasar dalam perumusan program, kegiatan, dan sub kegiatan pembangunan daerah yang berorientasi pada pencapaian visi dan misi Kepala Daerah.

Beberapa substansi penting dalam Renstra 2025-2029 Diskominfosanditik antara lain:

1. Penguatan tata kelola informasi publik guna mewujudkan transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
2. Peningkatan kualitas layanan komunikasi publik yang berorientasi pada keterbukaan, partisipasi masyarakat, dan penguatan citra positif pemerintah daerah.
3. Pengembangan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk mendukung transformasi digital daerah.
4. Peningkatan keamanan informasi dan persandian guna menjamin kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi pemerintah.
5. Penguatan penyelenggaraan statistik sektoral untuk mewujudkan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan sesuai prinsip Satu Data Indonesia.

Pelaksanaan rencana strategis Diskominfosanditik tahun 2025-2029 berpedoman kaidah sebagai berikut ;

- Mengacu pada visi, misi, tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Sumedang tahun 2025-2029
- Dijalankan dengan sinergis dan terintegrasi dengan program pemerintah pusat dan propinsi
- Mengutamakan pendekatan good governance dan transformasi digital pemerintahan

Dengan tersusunnya Renstra Diskominfosanditik Tahun 2025–2029, diharapkan seluruh jajaran perangkat daerah dapat menjadikan dokumen ini sebagai acuan kerja dalam melaksanakan tugas dan fungsi secara konsisten, terukur, dan berkelanjutan.

Keberhasilan pelaksanaan Renstra sangat ditentukan oleh komitmen, integritas, serta kolaborasi antara pemerintah daerah, masyarakat, sektor swasta, dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan demikian, arah pembangunan di bidang komunikasi dan informatika, persandian, dan statistik akan mampu mewujudkan pemerintahan yang terbuka, informatif, aman, dan berbasis data guna mendukung tercapainya visi pembangunan Kabupaten Sumedang Tahun 2025–2029 yaitu “*Sumedang Simpati Semakin Maju Menuju Indonesia Emas Tahun 2045*”.

BUPATI SUMEDANG,

ttd

DONY AHMAD MUNIR